



UNIVERSITAS INDONESIA

**SEJARAH LEMBAGA KEBUDAYAAN NASIONAL DALAM
KESUSASTRAAN INDONESIA**

SKRIPSI

**MUHAMMAD ADI NUGROHO
0706292952**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI INDONESIA
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**SEJARAH LEMBAGA KEBUDAYAAN NASIONAL DALAM
KESUSASTRAAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

**MUHAMMAD ADI NUGROHO
0706292952**

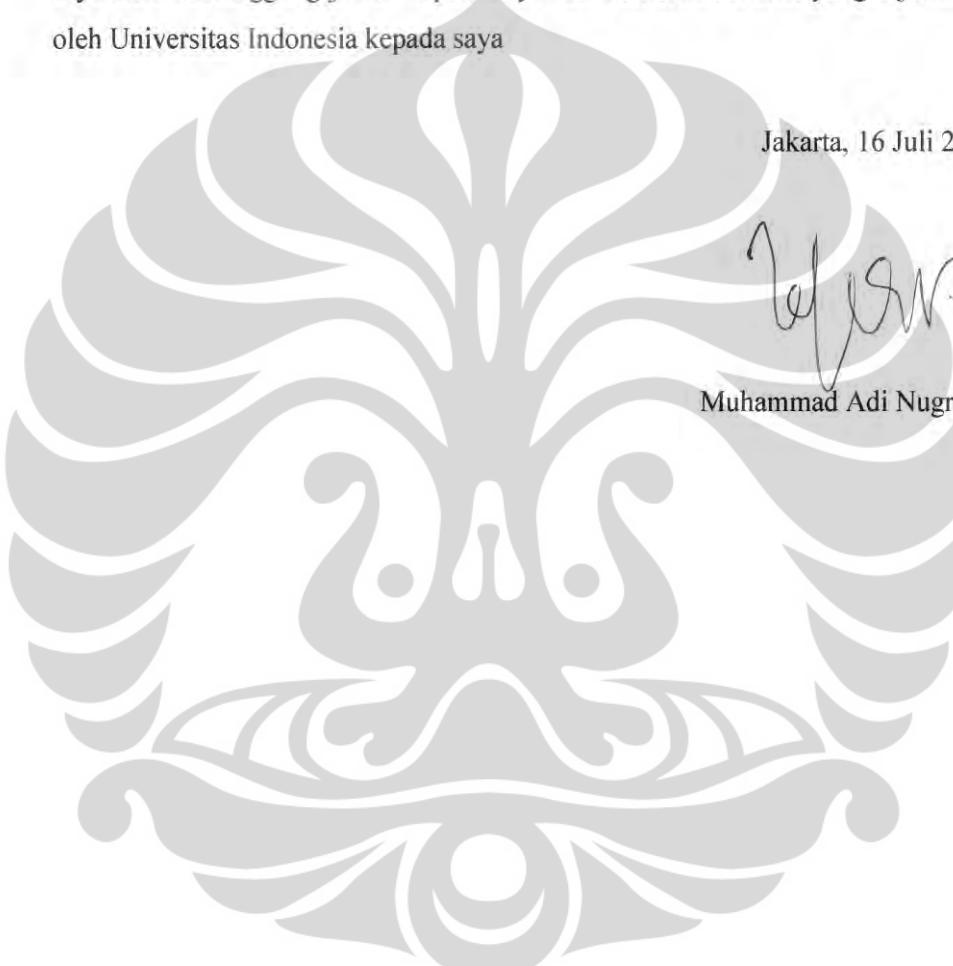
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI INDONESIA
DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya

Jakarta, 16 Juli 2012



Muhammad Adi Nugroho

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh,

Nama : Muhammad Adi Nugroho
NPM : 0706292952
Program Studi : Indonesia
Judul Skripsi : Sejarah Lembaga Kebudayaan Nasional dalam
Kesusasteraan Indonesia

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/Pengaji : Rasjid Sartuni, M. Hum. (.....) 
Ketua Pengaji : Totok Suhardiyanto, Ph. D. (.....) 
Pengaji : M. Yoesoef, M. Hum. (.....) 

Ditetapkan di: Depok, Universitas Indonesia

Tanggal : 16 Juli 2012

oleh.

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta, S. S., M. A.

NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini bukan hanya didedikasikan sebagai prasyarat mendapatkan gelar Sarjana Humaniora, melainkan penulis juga dedikasikan untuk perkembangan dan pertumbuhan akademis sastra Indonesia. Tema sejarah yang penulis angkat adalah upaya menghidupkan kembali situasi kebudayaan pada masa revolusi saat pertukaran ide dan pikiran begitu cepat.

Menjadi luar biasa di dunia yang biasa saja adalah suasana yang penulis rasakan. Perjuangan dan proses penulisan skripsi tidak akan bisa selesai dengan baik tanpa sebuah bimbingan dan arahan orang-orang yang peduli dengan sastra Indonesia. Penulis juga tak akan bergairah mengerjakan skripsi ini tanpa ada dorongan untuk segera merasakan dunia yang utuh, dunia luar kampus yang siap menyambut. Oleh karena itu, penulis ucapan terima kasih kepada:

1. Penguji, dosen yang mengajarkan saya Sejarah Kesusasteraan Indonesia sehingga mengenal kehidupan sejarah sastra dengan antusias. Terima kasih untuk Bapak Rasjid Sartuni telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing penulis sejak mengajukan skripsi pada semester tujuh sampai berakhir di semester sepuluh. Mohon maaf pula apabila penulis tidak dapat menjadi anak bimbingan yang baik.
2. Terima kasih kepada para penguji, Bapak Totok Suhardiyanto, dan Bapak Yoesoef yang berkenan memberikan masukan terbaiknya untuk skripsi penulis.
3. Ibu Nitra selaku pembimbing akademik yang telah baik dan sabarnya memberi arahan kepada penulis. Serta dosen-dosen Program Studi Indonesia yang terus memberi penulis dukungan untuk terus berkarya dan terus berkarya.
4. Ba Yuni Asep Sambodja yang telah meminjamkan buku-buku referensi serta membuka koneksi penulis dengan pelaku-pelaku kebudayaan pada masa revolusi. Berkat bantuan Ba Yuni, penulis semakin bersemangat untuk menyelesaikan penelitian sejarah LKN ini.

5. Keluarga tersayang Ibu (Hanifa Saeni), Bapak (Bambang Heryanto), dan Adek (Muhammad Alfin Nugroho) yang sudah memberi gairah hidup terus menyala-nyala.
6. Teman-teman Sastra Indonesia 2007 yang memaksa penulis segera lulus karena tidak kuat melihat kalian sudah menikmati dunia luar kampus.
7. Laskar 21, sebuah perkumpulan yang mengajarkan penulis arti ukhuwah. Sahabat terbaik penulis di dalamnya akhi-akhi cihuy, Anas Shobirin, Fahrino, Reza, Teguh. Juga para akhwat petakilan, Bela dan Fini. Setidaknya kalian semua sudah memberi warna yang berbeda dalam hidup penulis di dunia kampus ini. Untuk laskar 21 semoga kita terus bisa berjumpa sampai kita telah memiliki anak dan cucu.
8. Teman-teman Siyasi FIB UI, hmm agak males nyebut siyasi sebenarnya, haha. Tapi terima kasih ya lulu, odi, fini, bela, asti, ima, yang sudah menjadi anak berbakti buat bapakmu.
9. Teman-teman BEM FIB UI 2010 yang berjuang luar biasa. Ingat perjuangan kita kawan dalam membangun FIB yang penuh warna itu. Satu dalam juang: menebar manfaat dalam keberagaman. Anay anuy wakil gw yang juga sohib selama di kampus. Para korbid luar biasa yang membantu membuat inovasi proker dan pembaharuan di FIB, Fini Ipin yang selalu petakilan; Fadlan Babeh yang begitu semangat membeuta kehebohan politik bersama gw; Niki cilik yang gak gede-gede; juga ibu Tika yang selalu mendampingi gw di banyak kegiatan FIB, saying lo gak mau nemenin gw di BEM UI,haha. Juga kadep luar biasa Odi yang meneruskan jejak gw, Lulu di kesma yang jadi anak baik, Ba Nila yang membangun budaya keilmuan dan kebudayaan, Arman Hordenk, Reza penyuka binatang, Aang yang kabur ke Malaysia, Dwi, Cici Cina, Dek Peny, Ira Cipluk, Nadhil ngilang, juga Rima mata duitan. Kalian luar biasa
10. Teman-teman BEM UI 2011, *together ini excellence kawan!* BPH yang cihuy-cihuy prikitiuw yang sudah lulus terlebih dahulu atau berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Ada Maman rekan kepemimpinan yang kita saling mengerti akan perbedaan kita: untuk sebuah cinta. Abay teman satu kamar di Mpok Ani, rekan nggelo. Juga Marufi Kurnia tyang telah membantu

saya mengerjakan skripsi. Rekan seperjuangan kampus lain: Ijo dengan kerudung salamandernya, Rani FT dan Riza yang suaranya melebihi kegarangan Megawati. Ayat ngayat, Tri ngetri, Fadel, Fahmi abnon, Armance ,Diki, Rani ehemmm , Alince, Aya Sorabil, Cabekkk, Cipi Gembul, Ira Tangguh, Bunga Zahra, Uni Mega.

11. Terakhir, seluruh rekan-rekan FIB, UI, dan di mana pun itu.
12. Teman-teman jagat raya yang menjadikan semesta mendukung aktivitas cinta, jiwa, dan raga selama di UI.
13. Paling pusaka kuucapkan untuk kau yang telah menjadi mata air inspirasiku. Bila degup detak kau baca kalimat ini, itulah kau. “Denganmu, aku jalani dunia menuju surga”

Akhir kata, banyak pihak yang telah membantu. Terima kasih semuanya. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk perkembangan kesusasteraan Indonesia.

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adi Nugroho
NPM : 0706292952
Program Studi : Indonesia
Departemen : Sastra
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

Sejarah Lembaga Kebudayaan Nasional dalam Kesusastraan Indonesia

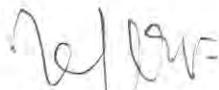
Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok

Pada tanggal: 16 Juli 2012

Yang menyatakan



Muhammad Adi Nugroho

ABSTRAK

Nama : Muhammad Adi Nugroho
Program Studi : Indonesia
Judul : Sejarah Lembaga Kebudayaan Nasional dalam
Kesusasteraan Indonesia

Skripsi ini membahas latar belakang lahirnya Lembaga Kebudayaan Nasional; konsepsi yang digunakannya dalam beraktivitas; dan sikap-sikap kelembagaan terhadap isu-isu kebudayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan kepustakaan sumber primer dengan pendekatan historiografi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LKN lahir dari hasil kongres PNI untuk dijadikan sayap perjuangan marhaenisme di bidang kebudayaan. Sikap-sikap LKN berpokok pada ajaran marhaenisme, yaitu memperjuangkan rakyat dan menolak imperialism.

Kata kunci:

Lembaga Kebudayaan Nasional, PNI, marhaenisme, kebudayaan

ABSTRACT

Name : Muhammad Adi Nugroho
Study Program : Indonesia
Title : Sejarah Lembaga Kebudayaan Nasional dalam
Kesusasteraan Indonesia

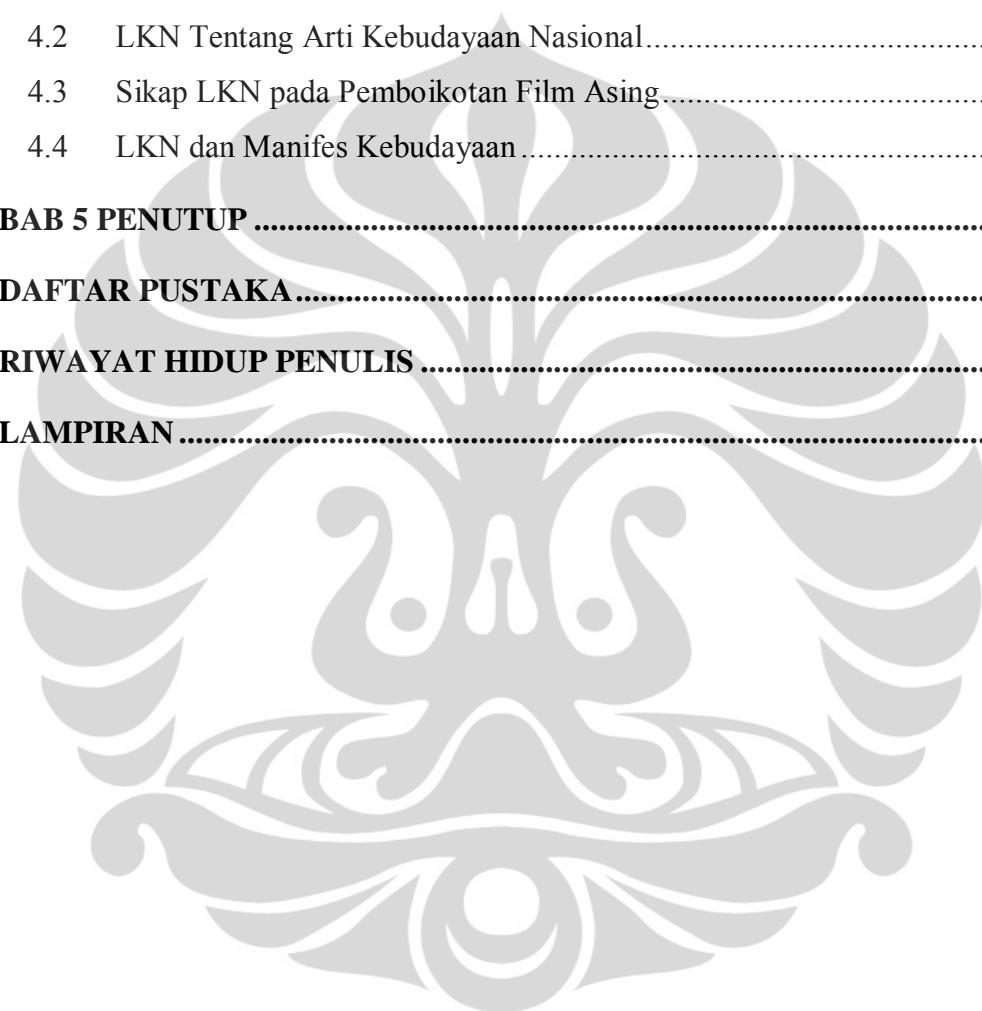
This thesis discusses the background of the birth of the National Cultural Institute; conception used in the move; and institutional attitudes towards cultural issues. The method used in this research is analytical and descriptive literature with approach historiography. This study concluded that the LKN was born from the congressional wing of the PNI to be Marhaenism struggle in the field of culture. LKN attitudes based on the teachings Marhaenism, the fight for the people and resist imperialism.

Key words: Lembaga Kebudayaan Nasional, PNI, marhaenism, culture.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup	6
1.6 Metodologi Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA KEBUDAYAAN NASIONAL 9	
2.1 Kongres Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) Ke- I.....	9
2.2 Konferensi Besar LKN	17
2.3 Kongres Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) ke-II	19
2.4 Tavip dan Musyawarah Seniman LKN.....	22
BAB 3 KONSEPSI LEMBAGA KEBUDAYAAN NASIONAL 26	
3.1 Marhaenisme sebagai Jiwa Kebudayaan LKN	26
3.2 Konsepsi LKN di Bidang Kesenian.....	27
3.2.1 Film	27

3.2.2 Drama	29
3.2.3 Seni Rupa.....	33
3.2.4 Sastra	36
BAB 4 SERUAN-SERUAN LEMBAGA KEBUDAYAAN NASIONAL	
MENYIKAPI ISU-ISU KEBUDAYAAN.....	43
4.1 Pengantar.....	43
4.2 LKN Tentang Arti Kebudayaan Nasional.....	45
4.3 Sikap LKN pada Pemboikotan Film Asing.....	50
4.4 LKN dan Manifes Kebudayaan	55
BAB 5 PENUTUP	66
DAFTAR PUSTAKA	69
RIWAYAT HIDUP PENULIS	72
LAMPIRAN	73



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sastra sebagai sebuah ilmu adalah gambaran realitas dari masyarakat. Di dalamnya terdapat replika kejadian nyata dalam bentuk tulisan melalui gaya bahasa yang menarik. Sastra sebagai realita tentu merekam kejadian dari beragam aspek: agama, sosial, budaya, ataupun politik.

Dalam sejarah dunia, dokumen paling awal yang menyebut sastra adalah *Republik* karya Plato. Dalam karyanya itu, Plato membahas hubungan antara masyarakat dan sastra. Menurutnya, setiap warga negara yang tinggal dalam republik idamannya haruslah mengedepankan akal sehat dan perasaan. Sastra sebaliknya, bagi Plato dapat menyuburkan perasaan dan mengeringkan akal sehat. Pada zaman itu pula, sastra yang memegang peranan penting dalam pendidikan anak harus disensor terlebih dulu sebelum sampai pada anak-anak. Dongeng-dongeng pertengkarannya dewa-dewa, misalnya, dianggap dapat memberikan efek negatif bagi anak sehingga harus disensor.

Faktanya, kegiatan sensor atau pelarangan karya sastra tidak hanya terjadi pada masa Plato. Meskipun perdebatan atas fungsi sastra masih akan terus berkembang mengikuti arus ilmu pengetahuan. Hubungan antara masyarakat, kekuasaan, politik, dan kepentingan penguasa tidak dapat disangkal jelas berhubungan dengan seluk beluk sastra baik karya maupun pengarangnya.

Hal ini pula yang terjadi di Indonesia. Hilangnya penyair solo, Wiji Thukul, menjadi contoh paling akhir dari persinggungan sastra dan masyarakat. Karya-karya Wiji Thukul dianggap memprovokasi masyarakat dan dapat membahayakan situasi politik pada masa orde baru. Begitu pula yang terjadi dengan Rendra, Emha Ainun Najib, Linus Suryadi A.G, N. Riantiarno yang dilarang mementaskan karyanya di masa orde baru karena dianggap berbahaya. Ada pula dari mereka yang harus dipenjara tanpa harus diadili dulu, seperti HAMKA, Pramodya Ananta Tour, dan Mochtar Lubis.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sastra sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Para penguasa menginginkan agar karya sastra yang terbit

haruslah berhaluan dan mendukung ideologi penguasa. Karya sastra yang tidak sehaluan dianggap membahayakan sehingga perlu disingkirkan. Bahkan, bila perlu para pengarang diteror habis-habisan sehingga tak jarang ada pengarang yang mengasingkan diri dan meninggalkan tanah airnya.¹

Dalam sejarah sastra Indonesia, masa-masa pengarang dipaksa untuk memiliki haluan yang sama dengan penguasa pernah terjadi pada periode 1950-1965an. Pada masa itu Indonesia menerapkan pemerintahan demokrasi terpimpin. Dengan salah satu partai terbesar pada saat itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekuasaannya yang besar dan pengorganisasian massa yang rapih serta garis perjuangannya untuk buruh, tani, dan tentara—massa paling banyak di Indonesia—memungkinkan PKI untuk melakukan doktrinasi ideologi politik dalam berbagai bidang.

Dengan kekuasaannya yang besar itulah PKI mendorong seniman-seniman yang berhaluan sama dengan PKI untuk melahirkan sebuah lembaga yang dapat menjadi salah satu tangan dari PKI. Lahirlah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada tanggal 17 Agustus 1950. Kekuatan PKI sebagai partai yang tersistematis dan terorganisasi dengan baik dibuktikan dengan keterlibatan langsung dua tokoh PKI, D. N. Aidit dan Njoto dalam pembentukan Lekra. Di kemudian hari pun kedua tokoh ini juga dikenal sebagai sastrawan Lekra dan produktivitasannya menghasilkan sebuah karya.

Organisasi Lekra menekankan dalam mukadimahnya bahwa ,”...Rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan , dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat,”² Hal tersebut sejalan dengan PKI yang melaksanakan agitasi, organisasi dan mobilisasi massa yang garis perjuangannya mendukung kepentinga rakyat.³

PKI sebagai partai politik yang terbesar dan berpengaruh juga memudahkan dalam pembentukan cabang-cabang dan penguatan Lekra sampai ke tingkat daerah. Otomatis, Lekra menjadi organisasi kebudayaan yang memiliki

¹ Nurdien H. Kristanto, -Kekuasaan, Politik, Ideologi, dan Sastra”, *Konstelasi Sastra: BungaRampai Esai Sasra* (Jakarta, 1990), hlm 185.

² Mukadimmah Lekra

³ Rakyat dalam pengertian komunis adalah golongan-golongan manusia tertindas dan terhisap, yaitu kaum buruh dan tani. Di kemudian hari tentara pun dianggap sebagai rakyat yang harus diperjuangkan bagi komunis.

kekuatan untuk memaksakan kehendaknya pada yang lain. Slogan “Politik adalah Panglima”, “Konsepsi Kebudayaan Rakyat”, dan “Seni untuk Rakyat” sebagai konsep dilaksanakan dalam segala aspek penciptaan karya seni dan persoalan kebudayaan. Lewat media massa yang dikuasai PKI, Harian Rakyat, Lekra menyampaikan gagasan serta karya-karya dari seniman Lekra secara rutin lewat rubrik budaya Lentera.

Dominasi serta agitasi Lekra dalam memaksakan ideologi pada masa itu dirasa sangat mengekang kebebasan proses kreatif bagi pengarang yang tak begitu setuju kalau seni sekadar mengabdi pada politik. Terlebih setelah keluarnya manifesto Politik dari Presiden Soekarno sejak 17 Agustus 1959, segala hal yang tak sejalan dengan Manipol dianggap mengancam dan “anti-Manipol” termasuk karya-karya sastra.

Kondisi tersebut memaksa banyak pengarang dan seniman menerjunkan dirinya dalam kekuatan politik yang ada. Mereka bernaung dalam lembaga kebudayaan partai politik dalam “poros Nasakom”—Nasionalis (PNI), Agama (NU), dan Komunis (PKI). Setidaknya, masuknya para seniman dan pengarang pada partai-partai tersebut menjadikan mereka aman dari cap anti-Manipol.

Namun, ada juga kelompok pengarang dan seniman yang tak tunduk pada konsepsi Lekra dan juga tidak mau terjun dalam partai politik. Mereka adalah sekolompok orang yang menandatangani sebuah pernyataan manifesto kebudayaan yang disusun pada 17 Agustus 1963. Manifes Kebudayaan menjadi sebuah pendirian di tengah kondisi kebudayaan pada masa itu yang menolak “Politik adalah Panglima”.

Tentu saja pernyataan tersebut menimbulkan reaksi yang tidak biasa. Lekra menganggap manifesto kebudayaan sebagai kontrarevolusioner dan tidak sejalan dengan konsepsi Manifesto Politik dari Bung Karno. Apalagi setelah sastrawan manifesto kebudayaan mampu menyelenggarakan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia pada 1-7 Maret 1964 yang dihadiri 1445 peserta dan 45 organisasi.

Alhasil, Lekra yang sejak semula tidak menyukai kelompok Manifesto Kebudayaan karena tidak sesuai dengan konsepsinya semakin gencar melakukan serangan terhadap manifestan. Puncaknya, Manifesto Kebudayaan yang dicap

kontrarevolusioner dilarang oleh Presiden Soekarno pada 8 Mei 1964. Pelarangan yang datang langsung dari Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno, semakin mengukuhkan posisi Lekra dan pendukungnya sebagai penguasa tunggal kebudayaan Indonesia.

Selanjutnya terjadilah masa yang boleh dibilang gelap bagi kesusastraan Indonesia. Diskusi-diskusi sastra tidak lagi berpokok pada estetika melainkan pada soal pro-revolusi atau kontra-revolusi. Istilah pengganyangan pun populer sebagai bentuk serangan dari seniman Lekra pada mereka yang kontra-revolusi.

Arief Budiman menyebut kondisi kebudayaan pada masa itu menyebabkan terbentuknya empat kelompok seniman dan budayawan. Kelompok pertama adalah Lekra; kedua berisikan seniman-seniman yang terjun dalam partai politik; ketiga kelompok Manifestasi Kebudayaan; dan keempat adalah seniman seperti Ajip Rosidi dan Trisnojuwono yang hanya bersimpati pada Manifestasi Kebudayaan tapi karena alasan tertentu tidak ikut dalam penandatanganan.⁴

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat—dalam hal ini politik—jelas tidak bisa lepas dari masyarakat. Sebuah periode yang tak boleh dilupakan begitu saja, di dalamnya terdapat peristiwa politik bersastra dan sastra berpolitik.⁵ Penelitian-penelitian terhadap peristiwa ini adalah sebuah proses menolak lupa. Juga jawaban terhadap pertanyaan dari Arief Budiman, “Beranikah kita melihat masa lalu sebagai sejarah”⁶.

Penelitian-penelitian perihal kondisi kesusastraan Indonesia periode 1950-1965 setidaknya telah dilakukan oleh beberapa pihak. Ada beberapa penulis yang membahas mengenai organisasinya, yaitu Lekra (Yahya Ismail 1972; Keitch Foulcer 1986; Taufik Ismail dan D.S. Moeljanto 1995). Ada pula pembahasan mengenai konflik antara LEKRA dengan kelompok yang ada di dalam Manifesto Kebudayaan (Keitch Foulcer 1969; 1994; Goenawan Mohammad 1988; Asep Sambodja 2009).

⁴ Arief Budiman, “Politik dalam Kesusastraan indonesia:Sebuah Gambaran Singkat”, *Kebebasan, Negara, Pembangunan* (Jakarta,2006), hlm 173

⁵ Ariel Heryanto, “Masihkan Politik Jadi Panglima: Politik Kesusastraan indonesia Mutakhir, *Sastera dan masyarakat Orde Baru*, no. 8 tahun XVII, 1998, hlm. 3-16

⁶ Arief Budiman, “Beranikah Kita Melihat Masa Lalu sebagai Sejarah”, *Horison*, Vol. XXI, no. 4, April, 1987, hlm. 111.112

Sayangnya, selama ini perhatian hanya tertuju pada dua kelompok saja, yaitu Lekra dan Manifesto Kebudayaan. Padahal, terdapat lembaga kebudayaan lain yang muncul pada masa 1950-1965. Belakangan muncul studi mengenai LESBUMI (Choiroton Chisaan, 2008), sedangkan lembaga lain semisal Lesbi (Partindo), LKASMI (PSI), Leski (PERTI), LKKI (Partai Katolik), HSBI dan ISBM. Begitu pula dengan LKN, lembaga kebudayaan di bawah Partai Nasional Indonesia yang prorevolusi. Lembaga yang selalu bersanding dengan Lekra dalam setiap aksi-aksi agitasi mengganyang mereka yang kontrarevolusioner. Dalam pengamatan, LKN belum terbahas dengan baik oleh para sejarawan meskipun secara ringkas. Baru I Nyoman Darma Putra yang mencoba menulis LKN dengan tulisan panjangnya. I Nyoman Darma Putra menulis mengenai LKN di daerah Bali. Tulisan tersebut terkumpul dalam kumpulan tulisan Ahli Waris Budaya Dunia; Menjadi Indonesia 1950-1965 (2011).

Oleh karena itu, LKN patut diangkat untuk diketahui bahwa di antara konflik besar antara Lekra dan Manifesto Kebudayaan terdapat lembaga pendukung lain yang terlibat dalam konflik tersebut. Inilah alasan LKN menarik untuk diangkat dalam penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian tersebut terdapat rumusan masalah yang akan diteliti untuk mengetahui perkembangan dari LKN. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses lahir dan perkembangan Lembaga Kebudayaan Nasional?
2. Bagaimana konsepsi Lembaga Kebudayaan Nasional?
3. Bagaimana sikap LKN menyikapi isu-isu kebudayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang lahirnya Lembaga Kebudayaan Nasional dan bagaimana kiprahnya pada periode 1959-1965.

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian terhadap Lembaga Kebudayaan Nasional secara baik sejauh ini baru dilakukan oleh I Nyoman Darma Putra tentang LKN di Bali. Kajian LKN di daerah lain ataupun dalam lingkup nasional belum sama sekali dibahas baik dalam tulisan panjang atau skripsi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai Lembaga Kebudayaan Nasional. Penelitian ini pun diharapkan dapat memperkaya khazanah sejarah kesusastraan Indonesia, terutama pada periode demokrasi terpimpin (1950-1965).

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini diberi judul "Sejarah Lembaga kebudayaan Nasional dalam Kesusastraan Indonesia". Periode yang penulis ambil adalah dari tahun 1959—1966. Tahun 1959 penulis ambil sebagai permulaan karena pada tahun inilah LKN lahir. Pembatasan pada penjelesan ideologi partai, platform, struktur organisasi, serta gerakan manifesto politik yang dilakukan lembaga kebudayaan dari awal terbentuk pada tahun 1959 sampai berakhirnya demokrasi terpimpin pada tahun 1966.

Alasan penentuan ruang lingkup tahun penelitian selama tahun 1959-1965 adalah tahun 1959 sebagai tahun terbentuknya Lembaga Kebudayaan Nasional. Ruang lingkup diakhiri tahun 1966, yaitu tepat pada tragedi gerakan 30 September oleh PKI.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang sangat ditunjang dengan metode penulisan sejarah. Menurut Leirissa, ada empat langkah dalam proses penelitian dokumen dan penulisan sejarah, yaitu pengumpulan sumber (heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Langkah pertama adalah menentukan subjek tema yang akan diteliti. Kemudian peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Sumber-sumber penelitian ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Nasional, Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin, perpustakaan Universitas Indonesia, serta buku-buku dari koleksi pribadi dan para dosen.

Dalam tahapan heuristik ini, pertama, penulis mengumpulkan sumber-sumber sekunder yang merangkum peristiwa kebudayaan pada periode 1950-1965. Sumber-sumber sekunder yang menjadi pegangan peneliti di awal adalah buku *Praharga Budaya: Kilas Balik Ofensif / Lekra DKK, Ahli Waris Budaya Budaya Dunia: menjadi Indonesia 1950-1965, dan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kejatuhan Lekra di Indonesia*. Setelah itu, penulis mendapat referensi pada sumber primer tema penelitian, yaitu harian Suluh periode 1959-1966 dan koran sezaman pada saat itu yang memuat tulisan tentang LKN.

Langkah berikutnya adalah kritik sumber. Penulis melakukan kritik terhadap sumber—terutama sumber sekunder—yang berupa buku untuk melihat keabsahan dari isinya. Penulis melakukan pengecekan sumber primer dari buku-buku yang mengulas peristiwa tersebut. Dari kritik ini penulis dapat menentukan sumber yang dapat dipakai dalam penelitian dan sumber yang tidak perlu digunakan.

Selanjutnya, tahap interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam penelusuran. Dalam tahap ini penulis mencoba meminimalisasi unsur subjektifitas dan berusaha seobjektif mungkin.⁷ Langkah terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah yang mengikuti metode penulisan sejarah. Langkah ini adalah rekonstruksi ulang peristiwa dengan mengurutkan peristiwa

⁷ Dalam penelitian ini penulis konsisten untuk Menifes Kebudayaan dan bukan Manikebu. Manikebu adalah ungkapan yang diplesetkan dari kelompok Lekra pada pihak Manifes Kebudayaan yang mengacu pada air mani kerbau (Mani-kebo). Penulis menganggap penulisan manikebu adalah sebagai kesalahan sejarah yang bisa terdorong pada sikap mendukung Lekra

berdasarkan sumber primer dan sekunder dalam satu kesatuan kerangka berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulisan terbagi dalam 5 bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan kelahiran Lembaga Kebudayaan Nasional. Bab ini berisikan kongres pertama dan kedua LKN beserta putusan-putusannya. Lalu, ada musyawarah seniman LKN yang menghasilkan sebuah konsepsi seni. Setelah itu ada perkembangan LKN dilihat dari sikap-sikap LKN terhadap isu-isu nasional maupun internasional. Juga sikap LKN terhadap kemunculan Manifes Kebudayaan

Bab ketiga Bab keempat penulis tempatkan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi di bidang kebudayaan dari LKN. Di dalamnya terdapat penjelasan yang berbeda dari setiap bidang kebudayaan.

Bab keempat menuliskan sikap-sikap kelembagaan LKN terhadap isu-isu kebudayaan. Lalu, bab kelima adalah penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian ini.

BAB 2

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA KEBUDAYAAN NASIONAL

2.1 Kongres Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) Ke- I

LKN berdiri sebagai sebuah lembaga tepat pada kongres pertamanya pada tanggal 20 Mei 1959 di Solo. Kongres tersebut dihadiri oleh utusan-utusan dari 21 daerah propinsi yang jumlahnya mencapai 150 orang. Kelahiran LKN sangat berbeda dengan Lekra yang pertama kali muncul adalah tingkat pusat atau nasional yang kemudian disusul pendirian Lekra tingkat daerah. LKN muncul dari lembaga tingkat daerah dengan nama Lembaga Kebudayaan Nasional atau pun dengan nama front marhaen. LKN daerah yang terlebih dahulu ada adalah cabang LKN Solo yang telah hadir dari tahun 1955 dan LKN Bali yang telah ada sejak 1956 dengan sebutan LKN cabang Denpasar.

Ada pula organisasi afiliasi yang menjadi pendukung dari kelahiran Lembaga Kebudayaan Nasional, seperti Pemuda Marhaen, Wanita Marhaen, Gerakan Mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) yang secara keseluruhan tergabung dalam Front Marhaen. Keterlibatan organisasi ini terlihat dari penyambutan saat pelepasan panji-pani LKN di Jakarta. Front Marhaen di daerah pun menjadi pembawa panji LKN yang dibawa secara estafet dari tanggal 9 Mei di Jakarta sampai tanggal 20 Mei di Solo. Lembaga Kesenian Rakyat Marhaen (Lekram) dari pusat sampai cabang pun memberikan dukungannya pada kongres, hal itu disampaikan lewat surat dukungan yang mengharapkan kongres dapat menggali kepribadian bangsa Indonesia.

Sejak akan dilaksanakannya kongres yang pertama, LKN dengan tegas menyampaikan maksud dan tujuan dirikannya lembaga ini. LKN secara tegas didirikan sebagai wadah kebudayaan PNI, bahwa kongres LKN merupakan pelaksanaan keputusan DPP PNI di bulan desember 1958.⁸ Kongres tersebut bertujuan untuk melaksanakan serta mewujudkan suasana ketidakragu-raguan PNI dalam gerak memelopori Pernyataan pendirian LKN sebaai bentuk pelaksanaan keputusan DPP PNI dalam bulan Desember disampaikan Hardi saat konfrensi

⁸ Pernyataan pendirian LKN sebaai bentuk pelaksanaan keputusan DPP PNI dalam bulan Desember disampaikan Hardi saat konferensi pers. "Besok Kongres LKN", Suluh, 19 Mei 1959.

pers. "Besok Kongres LKN", Suluh, 19 Mei 1959. Gagasan demokrasi Pancasila serta kembali kepada UUD 1945. PNI punsadar bahwa kemajuan bangsa tergantung dari maju atau tidaknya kebudayaan nasional.

Kongres LKN yang pertama digelar secara menarik. Dimulai dengan jalan estafet panji-panji LKN dari kantor PNI pusat di Jakarta dan berakhir di Solo. Estafet panji-panji LKN ini dilakukan oleh organisasi afiliasi yang tergabung Front Marhaenis di tiap kota sepanjang jalan Jakarta menuju Solo sejauh sekitar 900 km. Dimulai sejak tanggal 9 Mei dan berakhir satu hari menjelang kongres 19 Mei 1959

Selain itu, pekan kesenian turut menyemarakkan kongres ini. Harian *Suluh Indonesia* menurunkan berita besar dengan menyebutkan bahwa Solo diliputi pesta seni sebagai bentuk penyambutan Kongres LKN. Dalam pesta seni ini terdapat pawai besar Bhineka tunggal Ika yang mempertunjukkan pakaian-pakaian adat dari seluruh suku di Indonesia. Pawai ini bergerak dari alun-alun utara menuju Balai Kota Solo. Dalam pekan pertunjukan yang dinamai Pekan Kesenian Front Marhaenis di Taman Sriwedari banyak menampilkan tontonan wayang orang, bioskop, gendrang wanita dari Wonosobo, orkes angklung dari Sunda, tari-tarian Bali, dagelan Mataram dan penampilan seni dari cabang-cabang lain.

Kongres LKN yang dilangsungkan di gedung Chuan Min Kung Hui Sorogenen, 20 Mei 1959 adalah kongres yang waktu dan tempatnya dipersiapkan dengan matang oleh panitia. Solo sebagai tempat kongres dipilih karena Solo adalah pusat kebudayaan. Harapannya kongres pertama sekaligus pendirian Lembaga Kebudayaan Nasional mendapatkan apresiasi yang besar. Begitu pula penetapan kongres tepat pada hari Kebangkitan Nasional adalah upaya dari LKN agar kongres dapat berjalan dengan baik. Budi Utomo dianggap sebagai organisasi pertama yang menegaskan pentingnya kebudayaan bagi suatu bangsa. Pemilihan tanggal pun dimaksudkan bukan sekadar perayaan Hari Kebangkitan Nasional, melainkan juga sebagai upaya menghargai usaha Budi Utomo di dalam lapangan kebudayaan. Kongres LKN ini adalah wujud perjuangan serta strategi yang pernah dicita-citakan oleh Budi Utomo, yaitu perjuangan lewat kebudayaan

Kongres LKN pun ternyata tak lepas dari banyak perbincangan. Penyebab utamanya jelas karena pembentukan LKN berada di bawah komando dari Partai Nasional Indonesia. Namun, Kongres LKN sempat dinyatakan gagal karena seorang pengarang terkemuka Achdiat K. Mihardja dalam wawancara dengan kantor berita APB, menyatakan bahwa “kongres LKN ke-1 itu adalah sebagai suatu kongres kebudayaan telah mengalami kegagalan”.⁹ Hal serupa juga dinyatakan dalam rubrik “komentar hari ini” harian *Duta Masyarakat* yang menganggap baik Lekra maupun LKN adalah sama.

Mereka merasa bahwa mereka lah yang benar membawa warna kebudayaan bagi seluruh Indonesia. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang mencerminkan kebudayaan Indonesia. Terlepas dari benar tidaknya, tentu saja mereka berhak untuk mencari pelbagai macam jalan untuk menaikkan nama mereka di muka umum.¹⁰

Selanjutnya kongres ini telah menghasilkan beberapa putusan-putusan. Kongres pertama LKN yang berlangsung pada tanggal 20 Mei 1959 di Solo menetapkan Sitor Situmorang sebagai ketua umum, Suharto, dan Subekti menjadi dewan perancang yang bertugas membuat kelengkapan pengurus dewan pimpinan dan pengurus pusat LKN dalam waktu singkat. Terpilihnya Sitor sebagai ketua umum LKN secara aklamasi adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan keaktifan Sitor dalam ranah kebudayaan dan juga politik baik bersama PNI ataupun afiliasinya kepada Lekra sebelum akhirnya berdiri LKN.

Putusan-putusan dalam kongres pertama LKN sebenarnya hanyalah sebuah penegasan kembali pada kebudayaan nasional yang berulang kali didengungkan Presiden Soekarno dalam manifesto politik dan pidatonya di mana pun. Latar belakang penetapan tanggal 20 Mei mengikuti peristiwa lahirnya Budi Utomo pun menjadi dasar dari semangat kebudayaan nasional. Hal itu menjadi tenaga untuk lahirnya Lembaga Kebudayaan Nasional yang berkeinginan menciptakan daya cipta bangsa Indonesia.

Pada putusan-putusan yang lahir dari kongres ini, alur pikiran dan ideologi LKN memperlihatkan kedekatan dengan yang dipegang oleh Lekra. LKN

⁹ “LKN Gagal”, *Harian Rakyat*, 29 Mei 1959.

¹⁰ “Hikayat Sang Kancil”, *Duta Masyarakat*, 29 Mei 1959.

mengeluarkan slogan seperti ‐kesenian adalah rakyat” dan ‐seni untuk rakyat” yang juga sering didengungkan oleh Lekra. LKN menganggap bahwa penciptaan seni belum dapat dinamakan seni apabila belum dapat membuktikan fungsi sosialnya yang kreatif. Proses terjadinya seni bagi LKN bermula dari faktor keadaan, yaitu masyarakat sehingga tidak bisa melepaskan seni dari rakyat sebelum akhirnya dipadukan dengan bakat dan cita-cita.

Hal ini dapat dilihat dari cita-cita LKN dalam putusan kongresnya,

Lembaga Kebudayaan Nasional berpedoman pada cita:

Mengutamakan fungsi sosial dari seni, b. Menghormati dan membela kepribadian dalam seni sebagai bagian yang tali-temali dengan fungsi sosialnya, c. Berorientasi pada rakyat sebagai pelanjut tradisi nasional, dan sumber ilham yang tak ada kering-keringnya.¹¹

Dalam pedoman cita-cita LKN dapat dilihat bahwa ‐rakyat” menjadi kata kunci dalam gerakan kebudayaan. Rakyat diartikan sebagai tenaga kebudayaan yang nyata, baik sebagai pelanjut tradisi yang baik maupun sebagai sumber ilham seni yang selalu memperbarui dirinya.¹² Cita-cita tersebut memperlihatkan LKN ingin menegaskan bahwa kepribadian dalam seni, kepribadian nasional, apalagi kebudayaan nasional, adalah hal yang bersinggungan dengan fungsi sosial pencipta.

Dalam putusan tersebut juga nampak sebuah definisi baru dari kebudayaan nasional, yaitu puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional membentuk dirinya dengan tidak mengenyampingkan tradisi lama, tetapi menjadi sumber yang tidak pernah kering dan sumber penggalian untuk berkembang menjadi kebudayaan nasional. Tradisi baru bagi LKN adalah hasil dari perpaduan kebudayaan dari antardaerah atau antarnegara yang diakui mutu dan kualitasnya.

Kebudayaan nasional tidak hanya menjadi puncak bagi kebudayaan daerah yang bersuku-suku, tetapi kebudayaan negara lain yang dianggap baik bagi bangsa pun dapat menjadi kebudayaan nasional. Bagi LKN, kemajuan ilmu pengetahuan adalah contoh dari kebudayaan serta tradisi barat yang perlu ditiru.

¹¹ ‐Rakyat sumber ilham yang tak kering-keringnya dan pelanjut tradisi nasional”, Suluhan Indonesia, 21 Mei 1959.

¹² *Ibid*

Akan tetapi, kebudayaan individualisme, fasis, dan liberalisme barat tidak pantas dijadikan kebudayaan nasional. Hal ini menunjukkan sebuah sikap keterbukaan dan juga tidak melupakan kebudayaan lama. Dalam putusan kongres pun LKN berupaya mewujudkan kebudayaan dan kepribadian nasional; juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kebudayaan nasional Indonesia.

Hal-hal yang menjadi pokok pikiran dari hasil kongres juga menjadi sebuah penguatan dari arahan Presiden Soekarno. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mendukung kongres dengan mendorong para seniman untuk menjadikan seni sebagai alat. Presiden Soekarno menyebutnya, ‐pakailah senimu sebagai alat pembangunan”. Soekarno juga menyebutkan bahwa seni harus menjadi ‐tenaga pendorong pula bagi terciptanya Negara Kesatuan yang kuat yang dengan Demokrasi Terpimpin menuju sosialisme ala Indonesia.¹³

Kebudayaan nasional yang dijunjung oleh LKN adalah kebudayaan yang berpokok pada pemikiran Soekarno, yaitu marhaenisme. Kebudayaan marhaenis adalah budi daya masyarakat Marhaenis untuk mewujudkan hidup sama rata sama bahagia dengan sifatnya adalah kebudayaan nasional yang merata dari segala lapisan masyarakat. Dengan kebudayaan daerah sebagai sumber dan bahan utama bagi kebudayaan nasional.

Selain itu, apabila telah tercipta wujud baru, yaitu kebudayaan nasional; maka kebudayaan nasional haruslah memiliki corak yang akan membawa pada sebuah arah perbaikan dan mendukung revolusi Indonesia. Juti seorang wartawan *Suluh* menjelaskan dalam artikelnya mengenai corak kebudayaan nasional, yaitu

Hanya perlu dinyatakan dan sudah tidak perlu dinyatakan lagi, karena setiap orang telah mengetahui. Yakni corak kebudayaan Pancasila.

Kebudayaan nasional yang membangkitkan revolusi nasional kita ini, bukan kebudayaan feodal, bukan kebudayaan borjuis, bukan kebudayaan fasis, bukan kebudayaan yang lain-lain lagi, melainkan kebudayaan Pancasila.

Kebudayaan Pancasila mempunyai lima macam sifat, yakni:

1. Kebudayaan nasional yang menjadi lawan dari kebudayaan kolonial.

¹³ Pidato dimuat dalam Laporan Kongres LKN

2. Kebudayaan rakyat (kerakyatan), yang menjadi lawan dari kebudayaan feodal.
3. Kebudayaan sosialis, yang menjadi lawan dari kebudayaan borjuis.
4. Kebudayaan perikemanusiaan (humanisme), yang menjadi lawan dari kebudayaan fasis.
5. Kebudayaan ber-Ketuhanan yang menjadi lawan dari kebudayaan yang anti-Tuhan

Demikianlah corak kebudayaan nasional Indonesia, yang menjadi perintis jala, pendorong, pendobrak, dan pembimbing dari revolusi nasional kita sekarang ini.¹⁴

Penjabaran mengenai corak Kebudayaan Nasional sangat jelas diutarakan. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan Pancasila yang mendukung kebudayaan nasional, rakyat, sosialis, perikemanusiaan, dan ber-Ketuhanan. Oleh karena itu, kebudayaan nasional tidak memberi tempat dan juga menjadi lawan dari kebudayaan kolonial, feodal, borjuis, fasis, dan anti-Tuhan. Maksud dari kebudayaan nasional sebagai puncak kebudayaan daerah pun jelas sebagai bentuk pemilihan kebudayaan daerah yang baik bagi bangsa. Kebudayaan nasional bukanlah puncak kebudayaan daerah yang bersifat feodal karena itu menjadi lawan dari corak kebudayaan nasional.

Hal yang sama dengan kebudayaan asing; keberadaaan kebudayaan asing yang selalu diserukan Presiden Soekarno agar diwaspadai juga mendapat perhatian dalam kongres LKN.¹⁵ Gejala-gejala yang memungkinkan adanya pengaruh kebudayaan, terutama akibat perang dingin yang sedang berlangsung.¹⁶ Kongres memutuskan untuk mencegah setiap pengaruh perang dingin terhadap pelaksanaan kebudayaan nasional. Seruan tersebut ditujukan kepada para budayawan agar kebudayaan tidak dijadikan alat perang dingin.

Dalam hal kebudayaan dan pendidikan, tujuan LKN adalah mewujudkan kebudayaan marhaenis dengan pancasila sebagai dasar negara yang dapat

¹⁴ Juti, -Peranan Kebudayaan Nasional dalam Revolusi Kita, *Suluh*, 19 Mei 1959.

¹⁵ Ideologi yang dimaksud adalah humanisme universal. Ideologi ini berasal dari ideologi liberalisme yang menjunjung hak individu dan kebebasan kreatif.

¹⁶ -Apa yang terjadi dalam kancah kebudayaan Indonesia pada waktu itu hanyalah kepanjangan dari Perang Dingin antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet dengan Blok Barat pimpinan Amerika Serikat. Dengan sendirinya, kaum kiri lebih dekat secara politik dan kebudayaan dengan Uni Soviet dan kelompoknya, dan kelompok kanan lebih dekat dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat. Apa yang berasal dari timur disanjung oleh kelompok kiri dan apa yang dari barat digulung". Perni Hardi dalam Praharu Budaya hlm. 2.

dimasukkan dalam setiap mata pelajaran pendidikan nasional sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Jiwa proklamasi yang tertuang dalam UUD 45 menjadi pendorong utama untuk melancarkan perkembangan kebudayaan nasional yang bersifat marhaenis.¹⁷

LKN berpendapat bahwa mata pelajaran yang ekspresif kurang mendapat perhatian yang selayaknya sehingga hasil pendidikan intelektualistik. Kongres menyarankan agar memperbanyak mata pelajaran yang ekspresif agar bisa menyeimbangkan. Ekspresif adalah bentuk pembelajaran yang menyeimbangkan antara praktik dan teori. Meskipun sangat disayangkan LKN belum dapat memberikan contoh konkret dari wujud pendidikan yang ekspresif, dapat perkirakan LKN pada saat itu hanyalah memberikan landasan dalam pendidikan ekspresif. Bentuk dan pelaksanaannya dikembalikan pada pemerintah.

Selain itu, pendidikan nasional haruslah berusaha menghilangkan sis-sisa pendidikan kolonial. Hal tersebut bertujuan untuk membangun susunan masyarakat nasional dengan mempertimbangkan budaya asing masuk ke dalam budaya nasional dengan penyesuaian. Kelancaran perkembangan kebudayaan nasional yang bersifat marhaenis, maka dicetuskan jiwa revolusioner bangsa Indonesia, yaitu jiwa proklamasi yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.¹⁸

LKN menyebut dasar pendidikan nasional adalah kesadaran nasional, kebangkitan nasional, dan kebanggaan nasional. Lalu fungsi dari pendidikan nasional, yaitu pengantar, pengasuh, pengelah, pembimbing, pemupuk dan pelaksana. Semua usaha LKN dalam pendidikan dan kebudayaan yang disepakati dalam kongres menghasilkan beberapa program kerja, yaitu

1. Memperjuangkan supaya selekas mungkin diadakannya pendidikan dan pengajaran atas dasar nasionalisme,
2. Mempersiapkan undang-undang wajib belajar (leerplicht),
3. Memperjuangkan tambahnya sekolah rendah, menengah, dan tinggi (umum dan fak) dengan berangsur dalam 10 tahun,
4. Memperhebat pemberantasan buta huruf dengan rencana 10 tahun,

¹⁷ "Putusan-putusan Kongres LKN di Solo", Suluh, 27 Mei 1959.

¹⁸ Ibid

5. Memperjuangkan pengelusian pendidikan orang dewasa dalam pengetahuan vak,
6. Memperjuangkan supaya pemerintah menyediakan beasiswa sebanyak-banyaknya untuk murid-murid yang mampu, untuk menuntut pelajaran di dalam maupun di luar negeri,
7. Memperjuangkan adanya pengajaran cuma-cuma sekurang-kurangnya di sekolah rakyat,
8. Memberantas usaha-usaha perguruan yang karena mencari untung tidak memperhatikan mutu,
9. Mengatur dengan undang-undang perguruan bangsa asing agar tidak merugikan kepentingan negara,
10. Mengadakan perpustakaan dan alat-alat bacaan masyarakat seluas-seluasnya,
11. Mengusahakan berdirinya perkumpulan-perkumpulan olah raga dan kepaduan dimana-mana,
12. Mengadakan lembaga-lembaga rakyat untuk mengadakan ceramah-ceramah dan kursus-kursus, dan
13. Mengadakan taman-taman bermain bagi anak-anak (kindergarten), tempat bertamasya dan tempat beristirahat bagi anak-anak (kindervacantiekolonies).¹⁹

Dari program kerja tersebut sangat terlihat obsesi dari LKN untuk memajukan kebudayaan dalam bidang pendidikan sampai ke tingkat paling dasar. LKN menyadari bahwa akar sosialisasi paling utama untuk membangkitkan kebudayaan nasional adalah di jenjang sekolah, baik dari tingkat sekolah dasar (sekolah rakyat) sampai universitas. Masih banyaknya kondisi masyarakat yang buta huruf pun disadari LKN dengan menjadikannya dalam program kerja nyata agar semakin berkurang buta huruf di Indonesia. Selain memang program pemberantasan buta huruf adalah program besar Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin ini.

LKN tidak sekadar menuntut pemerintah sebagai untuk memenuhi kewajibannya di bidang pendidikan bagi rakyat, tetapi LKN juga bergerak aktif

¹⁹ *Ibid.*

dengan menuangkannya dalam program kerja nyata. Program kerja LKN untuk membentuk taman-taman bermain, taman tamasya, sampai terbentuknya lembaga kebudayaan rakyat adalah bentuk kepedulian LKN dalam membentuk kebudayaan nasional.

Di satu sisi, perekonomian Indonesia yang sedang mengalami gempuran produk asing turut mendapat perhatian dari kongres. Kongres meyakini bahwa dwi-saritunggal lahir dan batin sebagai pokok pangkal penghidupan manusia dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bentuk usaha itu diperlihatkan dari sikap LKN yang menolak adanya film-film impor sebagai bentuk perlindungan produksi film dalam negeri. Selain itu, mutu film dalam negeri pun dituntut untuk ditingkatkan. Pemerintah pun dituntut menurunkan pajak pengarang dan pajak karya seni.

Ada juga putusan untuk mendirikan secara kooperatif suatu dana kesenian khusus bagi para seniman. Kemudian memopulerkan kesenian kepada rakyat dan mendirikan secara kooperatif dana gedung kesenian. Hal ini menjadi bentuk dari perjuangan kebudayaan nasional, yaitu mendirikan lembaga-lembaga kesenian rakyat. Pemerintah diharapkan membantu dengan nyata usaha-usaha tersebut lewat lapangan percetakan, penerbitan, persuratkabaran, film, dan sandiwara.

LKN dapat dikatakan langsung menunjukkan eksistensi dalam politik kebudayaan. Hal ini nampak dengan ketegasan LKN yang lahir dari arahan PNI. Kemudian, dapat terlihat dari konsep seni yang diusung LKN. Dengan lahirnya LKN pun semakin memperkuat barisan slogan ‐Politik adalah Panglima” yang sebelumnya banyak diagitasikan oleh Lekra.

2.2 Konferensi Besar LKN

Setelah keberhasilan LKN dalam melangsungkan kongresnya yang pertama di Solo tahun 1959, LKN mengadakan konferensi yang pertama pada 19 sampai 20 Mei 1962 bertempat di gedung Panti Marhaenis Semarang. Konferensi ini dihadiri Dewan Daerah (DD) LKN seluruh Indonesia dari Aceh sampai Mandala. Selain itu, kongres ini turut dihadiri Ketua Umum PNI Mr. Ali

Sastroamidjojo serta tokoh-tokoh marhaenis dari seluruh LKN cabang Jawa Tengah.

Konferensi besar ini adalah bentuk penguatan kembali LKN sebagai sayap politik dari PNI. Hal ini tampak pada penjelasan dari Ali Sastro Amidjojo dalam sambutannya yang menekankan pentingnya LKN dalam keluarga Marhaenis, serta peranan kebudayaan dalam perjuangan politik bangsa. Dijelaskan pula bahwa politik adalah alat langsung dari revolusi untuk mencapai cita-cita bangsa. LKN sebagai sayap PNI menjadi alat tidak langsung dari partai politik untuk mencapai cita-cita bangsa.²⁰ Dalam konferensi ini LKN mengeluarkan beberapa putusannya berkaitan dengan kondisi kebudayaan dan bangsa. Pada putusannya ini LKN mengajak para budayawan dan pendidik untuk membangun jiwa sosialis Pancasila Indonesia untuk bangsa Indonesia. LKN pun mengajak para cendekiawan untuk memberi sumbangan besar kepada bangsa lewat ilmu pengetahuan dan menciptakan konsepsi yang konkret di berbagai bidang kehidupan.

Kondisi Indonesia yang sedang berjuang mendapatkan Irian Barat juga menjadi keputusan LKN dalam konferensi ini. LKN menyerukan kepada para seniman di berbagai bidang agar memperkuat usaha seninya. Usaha seni yang dimaksud adalah seni yang mengobarkan semangat Irian Barat dan menyatakan pendirian bahwa Irian Barat harus masuk dalam wilayah kekuasaan Indonesia tahun itu juga serta lepas dari jajahan Belanda. LKN mengecam tindakan imperialisme dan koloniaslisme Belanda agar melepas Irian Barat dari cengkeramannya.

Konferensi Besar LKN ini dapat dikatakan hanyalah bentuk konsolidasi biasa untuk menguatkan barisan LKN. Perkembangan LKN sejak 1959 dirasa harus dikumpulkan kembali dengan menyesuaikan kondisi kebudayaan dan perpolitikan Indonesia pada saat itu. Alhasil, selain penegasan LKN sebagai sayap kebudayaan PNI, kongres ini hanya menyampaikan sikapnya terhadap kondisi bangsa yang sedang berjuang mempertahankan Irian Barat dari Belanda.

²⁰ „Konferensi Besar LKN di buka”, Suluh, 19 Mei 1962.

2.3 Kongres Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) ke-II

LKN kembali melaksanakan kongres setelah sebelumnya berlangsung pada tanggal 20-21 Mei 1959 yang menjadi awal mula berdirinya Lembaga Kebudayaan Nasional. Kongres ini berlangsung pada tanggal 11-14 September di Kebayoran Baru, Jakarta. Kongres LKN yang kedua ini dimeriahkan dengan penampilan musik ansamble Sabang Merauke berupa nyanyian dan tarian yang berasal dari Sumatera Utara. Tidak hanya itu, kongres ini juga diramaikan dengan kegiatan seni lainnya yang turut memeriahkan kota Kebayoran.

Kongres kedua Lembaga Kebudayaan Nasional memiliki semboyan —Konsolidasi Garis Bung Karno di Lapangan Kebudayaan”. Pertemuan yang dilangsungkan di gedung Bumiputera ini dihadiri sebanyak 500 utusan LKN dari seluruh cabang yang ada di Indonesia. Semboyan —Knsolidasi Garis Bung Karno di Lapangan Kebudayaan” adalah wujud dari menyambut amanat Presiden Soekarno, yaitu —Genta Suara Revolusi Indonesia”. Penyelenggaraan kongres ini dimaksudkan untuk menerapkan semangat serta hasil-hasil yang dicapai dalam kongres PNI ke-X di Purwokerto pada bulan Agustus 1963.

Sejak berdirinya LKN di tahun 1959 sampai berlangsungnya kongres kedua pada 11-14 September 1963, terlihat bahwa LKN memiliki perkembangan yang pesat. Penyebaran sayap organisasi kebudayaan PNI ini telah tersebar dari Sabang sampai Irian Barat. Cabang LKN keseluruhan berjumlah 175 yang meliputi 20 daswati. Jumlah utusan yang datang dalam kongres ini pun berjumlah sebanyak 300 orang²¹. Hal ini wajar karena PNI adalah partai tersbesar di Indonesia pada saat itu. Keberadaan LKN sebagai sayap organisasi yang bernaung di bawah Front Marhaenis penyebaran LKN adalah sebuah keniscayaan mengikuti berkembangnya Partai Nasional Indonesia dan juga ideologi marhaenis.

Dalam laporan umumnya di kongres ini, Sitor Situmorang menyampaikan bahwa LKN sebagai bagian dari Front Marhaenis tetap berpendirian tegas untuk membela kepribadian nasional. Pembelaan ini adalah adanya pertarungan antara kekuatan lama dan baru, yaitu “*The New Emerging Forces*” dan “*The Old Established Forces*”.

²¹ —Konsolidasi Garis Bung Karno di Lapangan Kebudayaan”, Suluh, 11 September 1963.

Selain itu, ketua 1 DPP PNI, Hardi S. H. dalam sambutannya menyebut bahwa meskipun LKN memiliki ruang khusus di bidang kebudayaan, aktivitas LKN haruslah mengacu pada politik Marhaenis. Secara konkret, LKN harus bertujuan kepada kepentingan rakyat dan pengabdian masyarakat sosialis Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sejak semula keberadaan LKN memang menjadi sayap organisasi kebudayaan dari Partai Nasional Indonesia. Hanya saja baru di Kongres II LKN kedua inilah Hardi menegaskan bahwa LKN sebagai Gerakan Massa Marhaen harus mengikuti keputusan-keputusan kongres LKN, termasuk Kongres X PNI yang baru saja berlangsung tidak lama sebelum kongres LKN. LKN pun harus mengakui PNI sebagai induk organisasi yang menjadi pimpinan dalam Front Marhaenis. Dengan begitu PNI berhak melakukan pengawasan terhadap LKN dan Gerakan Massa Marhaenis lainnya secara represif maupun preventif.²² Selain itu, LKN dengan kongres kedua ini sudah menjadi sejajar dengan gerakan-gerakan massa Marhaen yang lain. LKN pun diharapkan sebagai organisasi perjuangan dapat bergerak secara teratur dan tidak ngawur.²³

Dalam pidatonya itu juga, Hardi menyampaikan kebudayaan haruslah sesuai dengan ajaran Bung Karno yang berazas pada Marhaenis dan identik dengan Pancasila. Tujuan dari kebudayaan Marhaenis/Sosialis ini, yaitu

Pertama, kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat, *kedua* keadaan sama rata sama bahagia di segala lapangan hidup, karena berlakunya demokrasi di segala lapangan yang dapat mewujudkan kemajuan rakyat. Tanpa demokrasi kemajuan rakyat tak dapat tumbuh, *ketiga*, demokrasi sosial yang mengharuskan adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mencapai kemajuan setinggi2nya sesuai dengan bakatnya, dan *keempat* kebudayaan daerah di samping adanya kebudayaan persatuan (nasio sosialisme).²⁴

Dari pidato tersebut dapat diketahui tujuan kebudayaan LKN berpegang pada ideologi Marhenis/Sosialis. Tujuan tersebut adalah penyempurnaan dari hasil kongres pertama LKN di Solo yang meninggikan kebudayaan nasional sebagai puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional dijunjung tanpa

²² „Aktivitas LKN Harus Didasarkan pada Politik Marhaenis-Manipolis”, Suluh, 12 September 1963.

²³ „Jangan Coba Pisahkan PNI dengan LKN”, Suluh, 16 September 1963.

²⁴ „Hasil Musyawarah LKN”, Suluh, 2 September 1964.

mengesampingkan kebudayaan daerah yang beraneka ragam di Indonesia. Kebudayaan pun tak bisa lepas dari demokrasi sebagai sumber dari segala kemajuan rakyat karena rakyat adalah sumber ilham dari kebudayaan LKN.

Pada kongres kedua ini, perwakilan DPP sementara LKN, Usep Ranuwidjaja, menyebut Bung Karno sebagai arsitek agung kebudayaan nasional. hal ini disebabkan oleh Bung Karno yang berjasa besar untuk memajukan kebudayaan nasional dan juga menjaga masuknya kebudayaan asing yang buruk.

Dalam kongres LKN yang kedua ini, ada beberapa putusan-putusan yang diperoleh. Salah satunya yang pernah menjadi keputusan adalah pengertian seni. LKN lebih mempertegas lagi pengertian seni yang bukan sekadar memperjuangkan rakyat. Dalam putusannya, pengertian seni yang wajib diperjuangkan oleh seniman-seniman Marhaen adalah sebagai seniman-seniman Pancasila. Manipol Usdek yang menjadi landasan haruslah mengabdi pada revolusi Indonesia yang didasarkan pada sifat-sifat kreatif, kerakyatan yang berbudi luhur, dan optimisme revolucioner menuju masyarakat sosialis Indonesia.

Melanjutkan hasil kongres pertama LKN di Solo, dalam bidang pendidikan LKN tidak lagi menciptakan sebuah program kerja. Putusan dalam bidang pendidikan berupa usulan kepada presiden agar menghentikan penyimpangan-penyimpangan yang ada di bidang pendidikan, seperti penggunaan sistem Pancawardana yang tidak menjamin tercapainya cita-cita pendidikan nasional berdasarkan pancasila. Sama halnya putusan di bidang politik, LKN menyoroti sikap pemerintah terhadap Malaysia; LKN mengutuk tindakan kolonial Inggris terhadap rakyat Kalimantan Utara

Dalam kongres LKN yang kedua ini pun dipilih pengurus harian yang baru. Penetapan pengurus harian dibentuk pada Maret 1964, menyusul kemudian beberapa bulan setelah berlangsungnya kongres. DPP LKN ini terdiri dari pengurus harian dan anggota. Pengurus harian LKN terdiri dari Usep Ranawijaya, Karna Rajasa, Alibsjah, Supeni, Sitor Situmorang, Bagin, Abadi, Soemali, dan Hardi. Dengan anggota-anggota yang akan memimpin departemen-departemen yang ada, yaitu Satia Graha, A. D. Donggo, Latif Hendiningrat, Kusbandar Ansor, Abubakar Abdy, dan Bagong Kusudiardjo.

2.4 Tavip dan Musyawarah Seniman LKN

Pada tanggal 17 Agustus 1964 Presiden Soekarno menyampaikan sebuah pidato yang menjadi semangat revolusi tepat di hari kemerdekaan Indonesia. Lewat pidatonya itu, Presiden Soekarno menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia bahwa tahun 1964 adalah ‐Tahun Vivere Pericosolo”²⁵ atau dikenal Tavip. Pidato itu menjadi seruan pada bangsa Indonesia untuk berpihak penuh pada rakyat yang revolusioner serta melaksanakan amanat penderitaan rakyat.

Hal-hal kebudayaan yang disampaikan Bung Karno pada pidatonya tidak jauh berbeda dengan pidato terdahulu saat mengeluarkan Manifesto Politiknya di tahun 1959. Pada saat itu Bung Karno menegaskan agar kebudayaan asing imperialis yang kontrarevolusioner di berantas dan kepribadian bangsa dibangun. Pada pidato Tavip ini Bung Karno mempertegas keputusan yang melarang Manifes Kebudayaan pada 8 Mei 1964. Kemudian diulang kembali seruan ‐ganyang Manifes Kebudayaan” dalam pidato Tavip sebab Manifes Kebudayaan melemahkan revolusi.

Bagi LKN pidato dari Presiden Soekarno, yang juga Bapak Marhaenisme dan panglima besar revolusi sudah menjadi arahan untuk dijalankan. Pidato Tavip merupakan garis penegas para seniman LKN untuk berpihak kepada siapa dan menjadi lawan yang kontrarevolusi. Amanat 17 Agustus 1964 menjadi tugas untuk LKN jalankan di bidang kebudayaan. Para seniman LKN menganggap amanat ini sebagai sebuah jalan untuk mengambil hak-hak mereka untuk berjuang penuh dalam revolusi. Hal itu sesuai dengan ucapan Bung Karno pada Kongres PNI, yaitu ‐berkompetisilah partai-partai dalam melaksanakan Manipol.” Pelaksanaan Manipol oleh LKN bukanlah hal yang baru karena Manipol adalah implikasi dari marhaenisme. Marhaenisme adalah dasar organisasi dari LKN sehingga pelaksanaan Manipol adalah pelaksanaan dari ajaran Marhaenisme.

Bagin, selaku Sekjen dari LKN memaparkan tugas LKN dalam artikelnya di harian suluh pada 29 Agustus 1964 dengan tegas. Tugas LKN dalam melaksanakan Tavip berisikan amanat untuk memperkuat organisasi secara internal sampai arti revolusi bagi seorang seniman. Dalam hal organisasi, LKN diharapkan

²⁵ Tavip adalah sebutan untuk Tahun Vivere Pericoloso atau tahun-tahun yang disebut Bung karno menyerempet-menyerempet bahaya.

mampu memperkokoh dan mengonsolidasikan dengan baik serta berdisiplin untuk meningkatkan militansi kerja.

Di bidang kebudayaan, seniman LKN harus mengonsepsikan dengan baik arti revolusi di bidang kebudayaan lewat penghayatan terus-menerus arti revolusi. Syarat revolusi yang mutlak itu adalah romantik (menjadikan rakyat sebagai ilham), dinamik (terus bergerak), dan dialektik (komunikasi dua arah dengan rakyat). Dengan pengertian revolusi itu pula LKN harus menjauhi diri dari sikap kompromi pada paham feodalisme, kapitalis birokratis, liberalism, dan humanism universal ala Manifes Kebudayaan. Maksud dari menjauhkan sikap kompromi adalah penegasan kepada pihak-pihak yang menjadi musuh revolusi.

Dalam menghasilkan sebuah karya, tugas LKN dari amanat itu adalah dengan menghasilkan karya seni yang menjadikan kaum imperialis sebagai perembesannya. Karya seni diciptakan sesuai dengan garis perkembangan revolusi yang tetap berorientasi dan berpihak pada rakyat marhaen. Orientasi itu menjadikan penelanjangan paham imperialis, feodalis, kapitalisme birokrat serta musah-musuh revolusi sebagai sebuah karya. Oleh karena itu, pertunjukan yang dihadirkan seniman LKN harus jauh dari paham yang bertentangan dengan syarat revolusi, yaitu dinamik, romantik, dan dialektik.

TAVIP atau Tahun Vivere Pericosolo inilah yang kemudian menjadi pegangan untuk melaksanakan garis Bung Karno di bidang Kebudayaan. Hal ini tertuang dalam mukadimah hasil musyawarah seniman-seniman LKN. Pada mukadimmah itu pula tertuang pernyataan LKN yang mendukung secara mufakat untuk melaksanakan Tavip.

Maka dalam hubungan Tavip yang bersejarah ini, seniman-seniman LKN yang bermusyawarah pada tanggal 25 Agustus 1964 di Jakarta sejumlah 100 orang dengan acara-acara yang khusus dan penuh hikmah kesadaran telah membahas “eara-cara Pelaksanaan” pidato presiden/penglima tertinggi/pemimpin Besar Revolusi/ Bapak Marhaenisme Bung Karno yang berjudul “Tahun Vivere Pericosolo”, telah mengambil kata mufakat yang bulat:

1. Mendukung sepenuhnya pidato “Tahun Vivere Pericosolo”, (Tavip) dan siap sedia melaksanakannya untuk memenangkan Revolusi Indonesia.
2. Mengajak organisasi Kebudayaan Revolusioner Nasakom segera bermusyawarah untuk mengamalkan Tavip.

3. Musyawarah seniman-seniman LKN telah menyusun rumusan-rumusan untuk dibawa dalam musyawarah yang dimaksud.²⁶

Musyawarah seniman LKN itu berlangsung pada 25 Agustus 1964 di Jakarta sebagai upaya mendukung dan melaksanakan Tavip. Musyawarah LKN yang dihadiri 100 orang ini menghasilkan rumusan-rumusan di bidang kebudayaan untuk sastra, film, drama, dan tari. Rumusan tersebut adalah hasil dari musyawarah yang mencari cara pelaksanaan dari pidato Presiden Presiden sekaligus Panglima Besar Revolusi Soekarno. Hasil dari musyawarah menjadi penegasan bahwa LKN adalah lembaga kebudayaan yang Sukarnois.

Rumusan umum dari musyawarah seni LKN itu berisikan garis dan tugas kepada seniman-seniman LKN dan revolucioner untuk menjalankan sesuai arahan. Isi rumusan menyerukan untuk,

1. Mengintegrasikan seniman dan pekerja budaya dengan barisan rakyat yang sedang berevolusi untuk memenangkan revolusi,
2. Menciptakan karya seni dengan semangat revolusi untuk mengahancurkan proyek kolonialisme Malaysia, menghantam subversif, menghantam koruptor, dan menghantam manipulan lainnya,
3. Menciptakan karya seni yang merangsang semangat revolusi untuk ketahanan revolusi dalam peningkatan produksi untuk swasembada beras dan mensukseskan *landreform* untuk pembangunan industri,
4. Memanggungkan serta memfilmkan karya seni untuk dipertunjukkan di desa-desa, pabrik-pabrik, dan di perkebunan yang menjadi basis rakyat marhaen,
5. Belajar dari pengalaman agar bisa melihat arah yang lebih jelas di masa depan,
6. Berjuang dengan pemahaman romantik yang tidak akan mandek dan revolusi menjadi pemecah kesulitan, dan

²⁶ „Hasil Musyawarah LKN”, Suluh, 2 September 1964.

7. Memahami syarat-syarat revolusi yang mutlak, yaitu romantic, dinamik, dan dialektik karena dengan mengenal syarat-syarat itu kita tidak akan bingung dan kehilangan arah.²⁷

Selain itu, dalam Tavip diterangkan tahapan revolusi yang dicapai Indonesia. Bangsa Indonesia telah mencapai tahapan revolusi nasional demokratis dan tahap sosialis. Sosialis yang dimaksud adalah sosialis ala Indonesia yang berpedoman pada marhaen dan berjuang untuk buta kin (buruh, tani, dan rakyat miskin lainnya). Revolusi Indonesia adalah revolusi yang sifatnya destruktif dan konstruktif, yaitu penjebolan dan pembangunan. Destruktif dimaksudkan agar seni dalam revolusi Indonesiame menjebol aliran-aliran barat dalam kebudayaan seperti humanism universal. Lalu, konstruktif dengan menjadikan kebudayaan sebagai erjuangan revolusi dalam setiap karyanya. Hal ini menjadikan revolusi harus dijalankan dari atas dan dari bawah dengan program yang telah dijelaskan dalam Manifesti Politik Bung Karno.

Begitu pula dalam aktivitas kebudayaan, LKN memacu para senimannya untuk semakin produktif berkarya. Di samping itu pula keharusan meningkatkan kesadaran pembangunan karakter yang didasarkan pada ideologi Bhineka Tunggal Ika. Hal ini agar seniman LKN mampu mendapatkan kepribadian nasional yang mampu meninggikan kebudayaan daerah serta menyaring kebudayaan asing yang masuk secara besar-besaran.

²⁷ *ibid.*

BAB 3

KONSEPSI LKN

3.1 Marhaenisme sebagai Jiwa Kebudayaan LKN

Sejak berdiri, telah ditegaskan bahwa LKN adalah lembaga yang berada di bawah naungan PNI. Hal itu kembali ditegaskan kembali pada kongres LKN kedua dengan hasil keputusan bahwa PNI dan LKN tidak dapat dipisahkan. Kelembagaan LKN yang terhubung dengan PNI tentu akan menghubungkan juga ideologi yang dipegang oleh PNI, yaitu marhaenisme. Dari kongres pun telah jelas bahwa LKN lahir sebagai alat perjuangan revolusi di bidang kebudayaan.

Marhaenisme adalah sebuah ideologi yang lahir dari buah pikir Bung Karno. LKN menyebut marhaenisme sebagai komando LKN dalam menjalankan tugasnya. Penjelasan marhaen pernah disampaikan dalam sebuah Konferensi Partindo²⁸ di Mataram pada tahun 1933. Pengertian dari marhaenisme itu adalah

1. Marhaenisme, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio demokrasi ,
2. Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia, dan kaum melerat-melerat yang lain,
3. Marhaenisme adalah azas yang mengehendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan marhaen,
4. Marhaenisme adalah pula cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya, harus suatu perjuangan yang revolusioner,
5. Jadi marhaenisme adalah cara perjuangan dan azas yang mengehendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme,
6. Marhaenisme adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalankan marhaenisme.²⁹

Dari pengertian tersebut sangat gamblang menjelaskan marhaen. Pengertian marhaen itulah yang menjadi komando dari LKN dalam bergerak. Dua

²⁸ Partindo atau Partai Indonesia merupakan partai yang didirikan oleh Soekarno pada masa perjuangan kemerdekaan.

²⁹ Soekarno. "Marhaen dan Proletar" dari buku *Di Bawah Bendera Revolusi*. 1964.

pokok kemudian yang menjadi intisari dari marhaen, yaitu marhaen adalah kaum proletar; lalu, marhaen adalah perjuangan menghilangkan paham kapitalisme dan imperialisme di Indonesia. Implementasi marhaenisme di bidang kebudayaan dilakukan LKN dengan menyelaraskan setiap arah seni sesuai dengan ajaran marhaen. LKN menekankan setiap aktivitas kebudayaannya adalah perjuangan rakyat marhaen dan menghadang paham kapitalisme juga imperialisme.

Selanjutnya, konsep perjuangan LKN adalah perjuangan marhaenisme yang teraktualisasi dalam setiap slogan revolusi yang lahir dari Panglima Besar Revolusi Bung Karno. Penyelarasan perjuangan LKN dengan Manipol, Tavip, ataupun Pancasila akan kembali pada marhaen. Hal ini sudah ditegaskan pada kongres PNI pada tahun 1960 di Solo yang menyebut Manipol/USDEK adalah emanasi dari Marhaenisme.

Oleh karena itu, implementasi aktivitas kebudayaan LKN adalah wujud dari ajaran Marhaenisme. Ajaran pokok marhaenisme ini berpokok pada perjuangan marhaens dan menghilangkan imperialisme juga kapitalisme di Indonesia. Marhaenisme sebagai komando menjadi jiwa kebudayaan dari LKN

3.2 Konsepsi LKN di Bidang Kesenian

Konsepsi LKN adalah wujud dari perjuangan revolusi yang berpegang pada marhaenisme. Implementasi itu merupakan pelaksanaan garis-garis Bung Karno di bidang kebudayaan. Bidang-bidang kesenian tersebut diselaraskan dengan garis-garis perjuangan karena memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat. Ada empat bidang kesenian yang memiliki pengaruh cukup besar dalam menyebarkan cita-cita revolusi. Empat bidang tersebut adalah film, drama, seni rupa , dan sastra.

3.2.1 Film

Film adalah bidang kesenian yang efektif dalam menjalankan revolusi. Hal ini dikarenakan film menyajikan banyak unsur seni di dalamnya. Tidak hanya suara melainkan cerita sampai gambar menyajikan hiburan yang baik. Rakyat pun dapat menikmati hiburan dengan penyajian yang menyerupai realita. Pendekatan

kepada realita ini menjadi sebab film menjadi efektif dalam menjalankan revolusi atau indoktrinasi ideologi apapun

Bung Karno menyebut masalah film adalah masalah politik. Indonesia mengalami gempuran imperialisme kebudayaan lewat impor film. Bioskop-bioskop banyak mengalami penutupan karena kurangnya dukungan dari pemerintah. Hal inilah yang akhirnya membuat LKN perlu membuat rumusannya dalam menjalankan garis-garis Bung Karno di bidang film. Rumusan-rumusan film itu ditelurkan dalam Musyawarah Seniman LKN sebagai wujud implementasi dari Tahun Vivere Pericoloso (Tavip) yang disampaikan Bung Karno. Rumusan film itulah disebut sebagai konsepsi seni LKN di bidang film.

Marhaenisme sebagai pokok pikiran dasar menjadi sumber dalam menciptakan slogan-slogan revolusi dari Bung Karno. Slogan Bung Karno itu menjadi rumusan film LKN untuk mengaktualisasi paham marhaenisme. Ketika Presiden Soekarno melahirkan Manifesto Politik, maka manipol menjadi alat perjuangan dari LKN untuk mencapai revolusi. LKN menyebut film sebagai alat penerangan yang ampuh bagi rakyat sehingga isi film haruslah disesuaikan dengan kepentingan revolusi. Kepentingan revolusi ini berkembang sesuai arahan dari Panglima Besar Revolusi Presiden Soekarno.³⁰

Sitor Situmorang menyebut manipol dalam film dapat dijadikan sebagai “gumpalan dinamit artistik”.³¹ Nilai artistik yang perlu dicapai para penggarap film adalah dengan meresap secara utuh pemikiran serta aksi yang nyata di tengah masyarakat. Sentuhan dengan masyarakat ini mampu mengubah tema-tema kehidupan menjadi artistik dalam dunia film. Kondisi dominasi film impor secara umum disebabkan kemiskinan tema yang diangkat dalam sebuah film. Dengan menjadikan masyarakat sebagai tema, maka menurut Sitor Situmorang Indonesia tidak akan mengalami kekurangan tema untuk diangkat di film.

Menampilkan masyarakat sebagai tema bagi LKN adalah wujud dari tema kenyataan (realisme). Syarat tema kenyataan dalam sebuah film adalah mengaktifkan daya cipta untuk mengerti secara mendalam revolusi Indonesia ke dalam jiwa. Pengaruh revolusi inilah yang akan mendorong terciptanya film-film dengan tema kenyataan. Mengangkat tema ini pun, Sitor mengatakan bahwa

³⁰ „Hasil Musyawarah Seniman LKN”. Suluh, 4 September 1964.

³¹ Sitor Situmorang. „Meninggalkan Nilai Artistik Film Indonesia”. Suluh, 18 Maret 1964.

penggarap dunia film perlu memiliki ‐mata‐. ‐Mata‐ itu adalah mata kepala yang mampu menangkap peristiwa dan mata jiwa yang mampu meresapi jiwa revolusi Indonesia. Hal itu dikarenakan tema cerita bagi LKN haruslah mengutamakan perangsang semangat rakyat yang berjuang—menghancurkan musuh (imperialisme) dan membangun sosialisme (pancasila).³²

Di bidang film musyawarah tsb al merumuskan bahwa menyadari film adalah alat penerangan yang ampuh bagi rakyat marhaen ,maka isi film harus disesuaikan dengan kepentingan revolusi, tema cerita harus diutamakan pada perangsang semangat rakyat yang berjuang menghancurkan musuh revolusi dan membangun Sosialisme Indonesia.³³

Selain perkara tema, Sitor Situmorang menyebutkan bahwa perkara kritik film juga menjadi penyebab peningkatan kualitas film. Kritik mampu memberi penilaian positif dan negatif setiap karya film yang dihasilkan Indonesia. Sayangnya kualitas kritik film kualitasnya sama rendah dengan produksi film. Padahal, peningkatan kritik film mampu meningkatkan kualitas film

Kritik film kita sekarang umumnya masih berupa lata reklame atas dasar kebudayaan kosong, baik dari pihak si kritikus maupun dari pihak karya (objek) yang harus dinilai dibidang penyutradaraan, *acting*, penulisan dekor dll. Produser sebagai manusia kratifpun belumlah terlahir terbukti dari anggapan salah untuk menganggap seorang ‐tau ke yang sukses‐ bisa ditokohkan jadi produser.³⁴

Dari kutipan tersebut juga diungkapkan kritikus hanya sebagai papan reklame. Maksud dari papan reklame ini bahwa kritik film dari seorang kritikus tidak membawa nilai perubahan. Kritik film yang lahir sekadar memperkenalkan sebuah film saja layaknya papan reklame.

3.2.2 Drama

³² Hasil Musyawarah Seniman LKN". Suluh, 4 September 1964.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Drama sebagai salah satu cabang kesenian tidak mendapat serangan imperialis yang mengkhawatirkan. Meski begitu, LKN sebagai lembaga kebudayaan tetap merumuskan cabang kesenian agar konsepsi serta penciptaannya berdasarkan pada cita-cita manipol. Hal ini sudah menjadi arahan nyata dari LKN untuk berkompetisi menyebarkan Manipol dalam segala bidang.

Bidang ini masuk dalam rumusan Tavip meskipun dalam tahun-tahun sebelumnya tidak mendapat begitu banyak perhatian, kecuali sebagai bentuk drama modern. Film mendapatkan rumusannya sendiri dari Tavip karena menjadi alat revolusi paling efektif dan bidang yang mendapat cengkeraman imperialis cukup besar. Sama dengan cabang yang lain, drama pun harus mendasarkan proses kreatifnya pada semangat revolusi yang romantis, dinamik, dan dialektik.

Dalam Tavip, drama diarahkan secara nyata lewat program kerja dan penyusunan rencana yang sesuai dengan Tavip. Semangat inti tetap sama, yaitu mendobrak segala macam bentuk imperialis baik yang bersifat materil maupun non materil. Meski belum mengalami penetrasi yang besar dari imperialis, drama justru mendapat pengawasan agar tidak mendapat penetrasi imperialis. LKN harus berhati-hati agar tidak mendapatkan teori-teori drama dari imperialis yang bersifat postulat atau tidak dimengerti oleh rakyat. Secara sadar atau tidak sadar penetrasi teori-teori barat akan masuk lewat buku-buku terjemahan yang menjadi rujukan seniman drama.

Setelah melakukan pencegahan masuknya teori drama dari imperialis lewat penyaringan buku-buku teori drama. Maka selanjutnya, program dari LKN dalam melaksanakan Tavip sangat jelas, yaitu menanamkan kepada rakyat melalui drama konsepsi-konsepsi baru sesuai dengan garis Manipol Usdek. Konsepsi baru dalam penanaman itu adalah dengan melakukan pementasan ataupun pembinaan drama, kritik drama, esai, ataupun kritik atas diri sendiri agar tercapainya revolusi yang dialektik.

Untuk mencapai keberhasilan penanaman konsepsi Manipol yang sukses lewat drama, maka LKN perlu melibatkan rakyat sebagai subjek serta objek. Karya drama yang dibuat haruslah sesuai dengan selera rakyat agar rakyat kembali mencintai drama sebagai bentuk kesenian dan kebudayaan. Pelibatan rakyat seperti seruan menonton ataupun diskusi drama setelah pementasan

dimaksudkan agar rakyat turut merasakan perjuangan mencapai kemenangan revolusi. Begitu pula kerja sama dengan pers sama pentingnya. Pers menjadi alat yang dapat mengabarkan kerja drama dalam menanamkan konsepsi Manipol Usdek.

Dalam mencapai kemenangan revolusi di bidang drama, LKN lewat Tavipnya memberikan sebuah rumusan-rumusan lewat dua hal, yaitu naskah drama dan pementasan. Dalam memilih naskah drama, naskah haruslah memancarkan semangat revolusi. Di dalamnya terdapat beberapa makna muatan, yaitu menggantikan Malaysia dan ketahanan nasional. Menggantikan Malaysia dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialis yang menguasai Malaysia. Lalu, ketahanan nasional adalah terjaganya Indonesia dari imperialisme

Ketahanan nasional yang harus dicapai drama adalah drama yang menggambarkan pedesaan. Pedesaan dianggap sebagai landasan negara sehingga perlunya menampilkan masyarakat desa dalam drama. Dalam masyarakat desa yang harus menjadi tokoh protagonis adalah petani penggarap tanah. Ciri-ciri petani itu dapat dilihat dari pedoman, –sebagai manusia, petani juga mempunyai harapan, dan mempunyai pula rasa gembira dan rasa kecewa. Kaum tani harus yakin bahwa dia bekerja untuk masa depannya”.³⁵

Lebih jelas lagi Tavip mencirikan “petani” yang dimaksud dalam marhaen dalam delapan ciri, yaitu

Tavip, mengartikan petani,

- a) Dia adalah manusia
- b) Dia adalah petani dengan watak kaum tani pula. Wataknya tidak mempertunjukkan bagaimana dia menggarap tanah saja, tetapi watak yang tahu “tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan.”
- c) Karena ia sang petani tadi juga punya pengharapan
- d) Punya rasa gembira
- e) Tetapi pak tani tadi dalam situasi harapan, gembira, dan kecewa itu tadi dengan suatu keyakinan bahwa dia
- f) Bekerja
- g) Untuk masa depannya³⁶

³⁵ Hasil Musyawarah seniman LKN”, Suluh, 5 September 1964.

³⁶ Ibid.

Selain petani, unsur masyarakat desa yang digarap adalah buruh. Buruh sebagai rakyat marhaen mutlak diperlukan dalam revolusi Indonesia. Buruh menjadi tokoh protagonis yang heroik dalam melaksanakan kewajibankewajibannya serta memperjuangkan haknya. Kemudian, perjuangan Indonesia melawan Malaysia pun dijadikan tema dengan mengambil bagian tindakan buruh dalam mengambil alih terhadap milik asing.

Setalah merumuskan tema drama, selanjutnya adalah segi pementasan. Segi pementasan drama LKN dicapai dengan dua istilah, yaitu “turun ke bawah” dan drama “dari bawah” serta mengusulkan adanya pekan teater nasional. Kata-kata bawah menjadi acuan seniman LKN karena tugas seorang seniman adalah mengintegrasikan diri dengan golongan bawah, yaitu buruh, tani dan orang miskin lainnya.

Drama “turun ke bawah”, yaitu grup-grup drama mengintegrasikan diri sampai tingkat pedesaan paling bawah, perkebunan, dan ke pabrik-pabrik tempat adanya proyek-proyek yang vital. Hal ini dimaksudkan agar drama tadi dapat dipentaskan dengan langsung menghampiri penonton. Selanjutnya, agar pementasan memberikan sebuah kesan yang baik, maka setelah pementasan berlangsung grup-grup drama harus memberikan ceramah drama. Ceramah drama ini bisa berisikan dengan penanaman ideologi dari ajaran Bapak Marhaenis Bung Karno dengan isi drama, dapat juga cerama berisikan pengetahuan-pengetahuan tentang drama agar dapat menghasilkan bibit baru dari tempat dipentaskannya drama. Begitu pula dengan “drama dari bawah”, yaitu adanya kader drama yang baik dari tingkat paling bawah di struktur masyarakat desa.

Demi meningkatkan mutu drama serta adanya kompetisi, maka LKN merumuskan agar diadakannya pekan teater nasional. Pekan teater nasional ini melibatkan lembaga-lembaga kebudayaan yang progresif revolusioner atau yang tergabung dalam poros Nasakom. Pelaksanaan pekan teater nasional dirumuskan agar terlaksana sampai tingkat daswati yang berada di setiap lingkungan lembaga kebudayaan masing-masing.

Dalam produksi sebuah drama dari LKN berjudul “Djangan takut dilanda Ombak”,³⁷ mencerminkan drama sebagai sebuah alat revolusi seperti yang

³⁷ “Djangan takut dilanda Ombak”, Harian Rakyat, 29 November 1964.

tertuang dalam Tavip. Unsur-unsur dan penggrapan tema yang harus ada dalam sebuah drama, seperti tani yang berjuang agar tanahnya tidak dijadikan alat penghisapan direfleksikan dengan baik. Drama ini dibuat dari naskah karya Motinggo Bosje. Kisah dalam drama ini memperlihatkan perjuangan sekelompok nelayan miskin yang berjuang membebaskan diri dari eksplorasi lintah darat. Nelayan dalam drama ini masuk dalam kategori rakyat dari LKN, yaitu buruh, tani, dan rakyat miskin lainnya. Nelayan masuk dalam rakyat marhaen sebagai rakyat miskin.

3.2.3 Seni Rupa

Sejak berdiri tahun 1959 sampai tahun 1964, tercatat LKN telah menyelenggarakan pameran lukisan nasional sebanyak tiga kali. Pertama kali pameran lukisan terlaksana pada tahun 1959 di Surakarta untuk menyambut lahirnya Lembaga Kebudayaan Nasional, kedua diselenggarakan di Yogya pada tahun 1961, dan ketiga pameran lukisan diselenggarakan di Balai Budaya Jakarta 24-30 Desember 1962.

Berbeda dengan pameran lukisan LKN yang sebelumnya, pameran lukisan pada tahun 1962 menghadirkan bukan saja pelukis dari LKN, tetapi juga menghadirkan pelukis-pelukis Jakarta dan Yogya yang pada saat itu sudah dikenal. Pada pameran tahun 1962 turut serta dalam pameran pelukis Zaini, Kusnaldi, Solihin, Nashar, Sudjono, Ipe Maaruf, Ali Basjah, Affandi, Sjahwil, Muljadi dengan total keterlibatan sebanyak 27 pelukis. Mayoritas pameran lukisan diwakili oleh pelukis dari Yogya.

Pameran lukisan LKN ini mendapatkan catatan dari pengamat sastra sekaligus psikolog, Soe Hok Djin.³⁸ Dalam catatannya Soe Hok Djin melihat dalam pameran lukisan ini, para pelukis belum dapat mengungkapkan alam secara utuh. Sebagian besar pelukis hanya bisa mengungkapkan alam secara artistik saja. Artinya, alam digambarkan sebagaimana adanya sehingga Soe Hok Djin menyebut para pelukis Yogya yang banyak memamerkan lukisan baru sampai pada taraf impresi artistik belaka. Sitor Sitomorang pun dalam sambutan

³⁸ "Tjatatan dari Pemeran Seni Lukisan LKN", Suluh, 3 Januari 1963.

pembukaannya menyebutkan bahwa lukisan-lukisan yang dipamerkan masih jauh dari yang dicita-citakan.

Alibasjah pelukis LKN dari Yogyakarta yang juga memamerkan lukisannya, menurut Soe Hok Djin sebagai pelarian dari gaya Bandung yang banyak menekankan pada warna. Karya Alibasjah dalam pameran ini berupa patung primitif dengan bentuk demonis yang mirip dengan komposisi Bandung namun agak dekoratif. Proses yang dilakukan pelukis LKN Alibasjah sebenarnya sudah menggali kebudayaan lama Indonesia hanya saja menurut Soe Hok Djin belum diolah secara maksimal.

Upaya pameran lukisan yang dilakukan LKN juga upaya mendekatkan diri dengan Bung Karno. Hal ini dikarenakan Bung Karno sering menyebut dirinya sebagai seniman, menyukai lukisan, dan juga melukis. Pada 14 September rombongan LKN, yaitu Ibu Hardi, Sitor Situmorang, Ali Basah, Muslim Harahap, dan Ibu Gani Surjokusumo memberikan tanda mata berupa lukisan karya pelukis LKN, Soedarso dan A. C. Dake. Di malam itu pula Bung Karno menyatakan siap hadir di malam kesenian pada 18 September yang diketuai Ibu Hardi.

Seni rupa baik seni lukis maupun pahat juga telah dirumuskan dalam Tavip agar setiap karya sesuai dengan konsepsi Bung Karno. Dalam pidato Tavipnya, Bung Karno menyebutkan sebuah perumpamaan yang akhirnya menjadi amanat serta arahan seni rupa seniman LKN. Bung Karno menyebutkan, “biar melati dan mawar dan kenanga dan cempaka mekar bersama di taman sari Indonesia. Bukan bilalang, bukan rumput pahit bukan kamladean, bukan gang geng. Kamladean, bilalang, ganggang harus kita cabut sama sekali dari taman sari Indonesia”.

Maksud dari bunga-bunga yang bukan dari Indonesia adalah paham-paham imperialis yang bukan berasal dari Indonesia haruslah disingkirkan. Dalam bidang kebudayaan, seniman LKN mengartikan paham yang bukan dari Indonesia adalah aliran lukisan yang abstrak. Secara khusus bentuk lukisan Indonesia disesuaikan dengan konsepsi revolusi, konsepsi Bung Karno, yaitu lukisan yang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia. Lukisan-lukisan abstrak yang tidak sesuai dengan garis perjuangan revolusi dan aspirasi kerakyatan tidak usah diciptakan.

Bentuk-bentuk lukisan abstrak tersebut seniman LKN tujuhan kepada gaya lukisan Manifes Kebudayaan yang humanism universal. Meskipun arti keindonesiaan dan perjuangan revolusi dalam bentuk lukisan sebenarnya tidak dapat diartikan secara nyata. Seniman LKN dapat memisahkan dan mengartikan dengan baik bentuk-bentuk lukisan abstrak yang dihasilkan paham humanisme universal.

Tiap-tiap wajah seni rupa ini secara blak-blakan harus berani melepaskan bentuk dan ciri-ciri yang liberal dan feudalisme medekat dan sekaligus meninggalkan aliran bentuk konvesional statis dari falsafah lambang humanis universal Manifes Kebudayaan yang bobrok itu yang sama sekali tidak ada persesuaianya dan bertentangan mentah dengan jiwa dan perjuangan-perjuangan revolusi.³⁹

Lukisan-lukisan asbtrak ini biasanya memerlukan pendalaman lebih untuk dapat memaknai dan tidak menjadikan alam Indonesia sebagai Inspirasi.

Motif, tema, dan anatominya harus bersumber kepada jiwa aspirasi kerakyatan dan perjuangan revolusi bangsa yang benar-benar bisa dimengerti oleh rakyat, bukan sekadar kerja plagiat dan duplikat dari paham-paham reaksioner, tapi harus jelas dan tegas, demi untuk memenangkan perjuangan revolusi nasional dan revolusi umat manusia di dunia yang ekspresif berintikan kemanusiaan dengan pemikiran-pemikiran yang revolusioner pula.⁴⁰

Dari kutipan di atas jelaslah maksud dari kerakyatan dan perjuangan revolusi dalam lukisan. Lukisan abstrak adlaah lukisan yang sulit dimengerti oleh rakyat maksud dan tujuan. Bagi LKN, lukisan yang bergaris revolusi adalah lukisan bersumber dari rakyat sehingga dapat dipahami dengan baik maksud dari sebuah lukisan tersebut oleh rakyat. Sifat palgiat dan duplikat juga dianggap sebagai bentuk lukisan yang harus dijauhi oleh seniman LKN dalam berkarya. Mengingat pada masa itu banyak lukisan-lukisan yang mengekor dengan gaya yang sudah dikenal terlebih dahulu, seperti lukisan yogya yang banyak mengikut gaya Affandi.

³⁹ "Hasil Musyawarah Seniman LKN", Suluh, 7 September 1964.

⁴⁰ *Ibid.*

3.2.4 Sastra

Dapat dikatakan kegiatan sastra adalah kegiatan paling aktif yang dilakukan para seniman LKN. Hal ini bisa diwajarkan ketika menyempitnya arti seni yang merujuk pada sifat kepengarangan dan sastra. Meski tak bisa diasosiasikan kesenian dan kebudayaan itu sebagai kegiatan kepengarangan berupa sastra, yaitu drama, prosa, dan puisi.

Sejak berdirinya LKN, tugas kepengarangan sudah ditetapkan dengan jelas. Pengarang-pengarang LKN haruslah menjadikan rakyat sebagai sumber ilham yang tidak ada habisnya sebagai sumber karya. Karya-karya pengarang LKN harus memperjuangkan rakyat. Isi dan tujuannya hanyalah untuk rakyat karena “rakyat” menjadi kata kunci dalam setiap penciptaan. Oleh karena itu, seni belum dapat dikatakan seni bila belum memperlihatkan fungsi sosialnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sastra sebagai aktivitas kebudayaan paling sering dapat dimaklumi dengan keberadaan Sitor Situmorang. Tokoh ini, Sitor Situomorang dapat dikatakan sebagai panglima kebudayaan marhaenis⁴¹ LKN karena posisinya sebagai Ketua LKN pusat sekaligus seorang sastrawan yang dikenal pada masanya. Buah pemikiran Sitor Situmorang dapat dikatakan sebagai ajaran atau sikap seni dari LKN. Buah pemikiran Sitor dalam setiap bidang kebudayaan tentunya adalah hasil manifestasinya dari pemikiran Bung karno yang tertuang dalam Manipol dan Tavip yang mengedepankan ajaran Marhaen.

Sebelum terjun dalam dunia politik, Sitor Situmorang sudahlah dikenal sebagai sastrawan yang baik dengan tiga buah kumpulan puisi dan satu buah kumpulan cerpen. Pemikirannya yang banyak menghiasi bidang kebudayaan LKN adalah wajar karena Sitor Situmorang dikenal sebagai seorang kritikus film, esai, dan penulis drama. Mungkin hanya tarian dan musik saja yang jarang mendapatkan ulasan dari Sitor.

Contoh puisi dari Sitor Situmorang yang mencerminkan bentuk karya-karya LKN, yaitu

⁴¹ Pramoeda Ananta Toer. –Mas Sitor Situmorang: Panglima Kebudayaan Marhaenis”, Republik, 15 Juli 1959.

Hiduplah, hidup

Kaum melarat, kaum pengarap tanah tercinta
 Karena cinta pada hidup
 Tak pernah menunggu perintah
 Apalagi dari tuan tanah

Dari puisi di atas dapat terlihat semangat Sitor untuk menggambarkan rakyat petani yang berjuang lepas dari penghisap tanah. Puisi tersebut juga masuk dalam catatan I Wayan Warna dalam artikelnya ‐Menudju Sastera Marhaenis” di harian *Suluh* yang dimuat bersambung dari 8-15 Mei 1966. Keterlibatan rakyat dalam sebuah karya bagi Sitor adalah perwujudan sastra yang hidup. Sastra yang hidup bagi Sitor adalah sastra yang tumbuh bukan karena sekadar teori saja, melainkan sastra yang fungsinya hidup sebagai tugas revolusi nasional.⁴²

Pada puisinya yang lain, Sitor memberikan sebuah pengingatan agar untuk selalu kembali pada ajaran marhaen. Marhaenisme, sebuah istilah yang diadopsi Soekarno tahun 1920-an dari nama seorang petani miskin, Marhaen, yang sengsara, dan tidak memiliki apa-apa untuk melanjutkan hidupnya, Soekarno menjumpai petani miskin ini dan menjadikan namanya sebagai konsep untuk menjelaskan orang miskin di Indonesia.⁴³

Kembali kepada Marhaen Seruan Pak Ali

Kembali kepada Marhaen
 Itulah seruan pertanda zaman
 Dalam kemajuan, tandanya ada penyelewengan
 Bahwa
 Berjuang itu lebih penting, dari memungut hasil
 Untuk mana semua harus diikhlasan
 Ideologi adalah buah perkembangan masyarakat
 Revolusi menjadi proses kehidupan rakyat
 Pemimpin lahir-sejak dari Multatuli
 Karena penindasan maka menjadi
 Kemerdekaan bangsa berakar kemerdekaan rakyat
 Kepada Marhaen kembalilah, agar selamat,

⁴² ‐Sastra Indonesia sebagai manifest Kepertjajaan masa depan”, Suluh, 6 April 1964

⁴³ *Indonesia political thinking, 1945-1965*. Itchaca/London: Cornell University. Hlm. 157

Tuntut dan tuntut dan laksanakan:
 Landreform, U.U Bagi Hasil, Dewa Perusahaan
 Itulah Marhaenisme Bung Karno
 Dulu dan sekarang dan kemudian
 Suatu laporan bergaris dan bergairah
 Gerakan kemerdekaan heroic serta hidup yang

Pasrah

Wahai, pemimpin: Kepada Marhaen, kembalilah⁴⁴

Sitor Situmorang adalah konsepsi seni itu sendiri bagi LKN. Prasaran ataupun pernyataan yang dibuat Sitor berkaitan dengan sikap kebudayaan secara tidak langsung adalah sikap dari LKN. Konsepsi sastra yang mendasarkan pada rakyat sebagai sumber ilham yang tak ada habisnya; karya yang memperlihatkan perjuangan revolusi rakyat Indonesia diperjelas dan dipertegas dalam rumusan-rumusan Tavip untuk bidang bidang sastra di kebudayaan.

Tahun Vivere Pericosolo sebagai sebuah pidato yang menyemangati kembali revolusi Indonesia adalah komando bagi sastra dalam berkarya. Sastra tidak lagi sekadar memperjuangkan rakyat, tetapi dalam Tavip sastra harus menjadi salah satu bagian yang dapat memenangkan revolusi. Karya sastra dengan tema yang digarap serta tokohnya adalah isi yang memenangkan revolusi. Dalam aktivitas sastra, Tavip mengarahkan agar sastra menuju sebuah ektivitas kebudayaan nasional yang mengabdi pada revolusi dengan kewajiban pokok revolusi. Kewajiban itu adalah menjebol nilai-nilai lama yang *established* dan konservatif. Sebagai manifest, sastra harus membangun mental dalam rangka *Nation Building* dan *Character Building* untuk memenangkan tujuan revolusi, yaitu sosialisme.

Konsepsi sastra berdasarkan rumusan-rumsuan Tavip menjadi sebuah bentuk nyata sebagai sebuah sastra revolusioner. Dijelaskan bahwa sastra revolusioner pada sastra adalah

Sastranrevolusioner tidak lain dari sastra manipolis, sastra pancasilais, sastra yang berjuang, sastra yang memihak penderitaan rakyat, sastra yang menelanjangi penindasan dan pemerasan, sastra yang membangun moral baru, manusia baru, dan sebagai sastra nasional maka

⁴⁴ Sitor Situmorang, -Kembalilah Kepada Marhaen". Suluh, 10 Juli 1963.

sastra revolusioner yang harus dibina itu berkembang dalam rangka gerak sejarah nasional kita secara mutlak⁴⁵

Pengertian sastra revolusioner dari Tavip itu jelas bahwa sebenarnya konsepsi seni ataupun sastra LKN tidak berubah sejak diberlangsungkannya kongres yang pertama. Fungsi sastra yang memperjuangkan rakyat tidak lain adalah bentuk dari konsepsi Manipol Bung Karno yang lahir di tahun 1959. Dari rumusan Tavip tersebut juga jelas bahwa sastra revolusioner adalah istilah lain dari sastra yang berpegang untuk rakyat; berpegang pada pancasila, Manipol, atau ajaran-ajaran Marhaen lain yang lahir dari Panglima Besar Revolusi Presiden Soekarno.

Sitor pun mengartikan sastra revolusioner seperti yang tertuang dalam puisi di atas. Sastra revolusioner haruslah memperjuangkan rakyat marhaen, yaitu butakin (buruh, tani, dan rakyat miskin lainnya). Sitor Situmorang lebih memperjelas lagi bahwa sastra revolusioner adalah sastra yang bertujuan memenangkan cita-cita revolusi, yaitu sosialisme ala Indonesia.

Di zaman memperjuangkan sosialisme sastra diminta ikut memperjuangkannya, dengan mengabdi kepada politik perjuangan itu. Di zaman pembangunan nanti, kalau kekuasaan sosialisme sudah berdiri maka sastra revolusioner meneruskan pengabdianya dalam bentuk pengabdian kepada pembangunan sosialis.⁴⁶

LKN dalam menjalankan sastra revolusioner selanjutnya haruslah mengerti paham-paham yang tidak sesuai dengan revolusi. Dalam hal ini LKN harus menghancurkan paham Manifes Kebudayaan yang menjadi teror dalam prinsip Manipol dan Pancasila. Paham kosmopolitan yang menjelma menjadi humanismne universal dari Manifes Kebudayaan adalah imperialis yang nyata perlu ditolak secara mentah-mentah. LKN menolak semboyan dari Manifes Kebudayaan yang berbunyi, –Karena kita adalah seniman maka kita adalah pejuang

⁴⁵ „Hasil Musyawarah seniman-seniman LKN”, Suluh, 3 September 1964.

⁴⁶ Sitor Situmorang., „Sastra Revolusioner”. *Sastra Revolusioner*. Lembaga Kebudayaan Nasional: Jawa Barat. hlm. 15.

atau bahwa sastra itu dengan sendirinya revolusioner". Berbeda dengan semboyan LKN, yaitu "Kita adlaah seniman pejuang tetapi bukti bahwa kita adlaah seniman pejuang ditentukan oleh pengabdian konkret kita, baik dalam karya maupun sikap hidup terhadap perjuangan itu sendiri."⁴⁷

Hal yang ditolak selanjutnya dalam rumusan Tavip adalah sastra konvensional kurang estetika tanpa perjuangan. Sastra kovenersonal yang ditolak LKN adalah paham-paham abstrak, nihilisme, dan intelektualisme. Sastra revolusioner harus menjadi sastra baru dengan estetika juga memiliki nilai lebih perjuangan. Contoh puisi yang memiliki nilai estetika sekaligus nilai perjuangan dari sastra revolusioner dapat terlihat dari puisi Sanusi Surya Permana,

Wajah yang Pijar dari Desa

Putihnya mengelimi tanah Air, mari
pasir yang menggaris dan relung langit yang manis
subur tanahku dan desa di jantungnya damai berseri

Manisnya ladang dan tanah gembur
dimana Inah bersenandung menanam jagung
diiringi seninya suling anak gembala
dan kicau burung yang merdu
bikin aku rindu padamu, Mari kekasihku

Besok sawahpun mulai kuning
kampung terbenam dalam kekeringanmusim panen
dan wajah yang berpapasan selalu seminar bening
tanda persahabatan, perjuangan dan harapan

Nanti kami boleh nyanyi dan jalan ke pantai
bertegur sapa degan kawan nelayan yang baru datang
adalah kami yang senasib sepenanggungan

Sedapnya ia berbicara
tentang biru laut dan ombak besar
tentang topan yang menganyam
tentang perjuangan, kehidupan, dan kepasrahan

⁴⁷ *Ibidi.*

Mari kekasih, tengoklah kami sesekali
buruh, tani, nelayan, dan semua kaum marhaen di desa
yang selalu tekun dan enunjang
demi Tanah Air kekasih
demi amma rakyat yang tercinta

Adalah wajah kita yang selalu pijar, Mari
tangan kita yang selalu kekar
kitalah yang menolak kemiskinan penghidupan dan penindasan
hati kita selalu sukarela nyatakan perang kepadanya
dan kita pasti menang.⁴⁸

Dari puisi tersebut dapat dilihat perpaduan antara estetika dan perjuangan. Sanusi mampu menampilkan citraan yang baik dalam suasana desa. Dia juga mampu memadukan nuansa perjuangan kaum marhaen dalam puisinya. Puisi berjudul "Wajah yang Pijar dari Desa" dari Sanusi adalah bentuk yang baik dari sastra revolusioner yang digariskan Tavip untuk sastrawan LKN.

Dalam tema, sastra revolusioner haruslah memihak pada rakyat marhaen atau menyerukan rakyat marhaen dalam berjuang. Tugas sastra revolusioner dengan menjadikan rakyat marhaen sebagai sokoguru serta inspirasi dalam berkarya. Secara kontekstual sastra revolusioner merumuskan kerja sastra yang meliputi novel, cerita pendek, puisi, dan esai untuk menciptakan terlaksananya pengganyangan terhadap tuan tanah, kapitalis birokrat, manipolis munafik, marhaenis munafik, dan terlaksananya UUPA/UUPBH⁴⁹.

Selain itu, sastra sama halnya dengan kerja revolusi di bidang kebudayaan yang lain, yaitu harus ikut menukseskan dwikora berupa swasembada beras dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah bentuk menjaga bangsa dari serangan imperialisme. LKN juga menyerukan semangat revolusi bagi rakyat Malaya, dan Singapura dalam cengkeraman imperialis. Hal ini nampak dalam puisi berikut,

⁴⁸ "Wajah yang pidjardari desa", Suluh, 2 September 1964.

⁴⁹ UUPA adalah Undang-undang Pokok Agraria. Dalam seminar *Landreform* pada 17 Oktober-6 November, Menteri Sadjarwo dalam pidato mengatakan prinsip-prinsip *landreform* dalam undang-undang tersebut trdiri dari pengakuan terhadap pemilikan pribadi, penetapan fungsi sosial tanah dengan mengatur bentuk penggarapan tanah telantar menjadi tanah milik negara dan penghapusan tanah *absentee*. (Departemen Penerangan, Buku ke-1, Jakarta 91960. Hlm. 3-7).

kepada malaysia
(untuk pejuang kalimantan utara)

Merdeka!

suaranya menggegar, melalui daratan dan samudra
tak berbatas, tak mengenal warna

mengapakah harus menanti?
kemerdekaan sesuatu yang pasti
mengapakah harus dielakkan
kemerdekaan seperti kematian

berilah mereka kemerdekaan
atau sebutir peluru
yang padanya mereka begitu yakin
seperti adanya sirotol mustaqim

berilah mereka kemerdekaan
atau suatu kematian
yang padanya mereka pertaruhkan
atau segala pengorbanan⁵⁰

Untuk mencapai itu semua Tavip memberikan semboyan yang akan membimbing menuju tercapaiya kerja sastra yang revolusioner, yaitu tidak pura-pura, terus terang dan berani-seberaninya. Juga sastrawan pelaksana Tavip haruslah memiliki cita-cita hidup yang tinggi, patriotisme revolusioner, kerendahan hati untuk bersatu dengan penderitaan rakyat dan sikap revolusioner yang tegas.⁵¹

⁵⁰ Suluh, 17 Juli 1964

⁵¹ „Hasil Musyawarah Seniman LKN”, Suluh, 3 September 1964.

BAB 4

SERUAN-SERUAN LEMBAGA KEBUDAYAAN NASIONAL

MENYIKAPI ISU-ISU KEBUDAYAAN

4.1 Pengantar

Ciri khas LKN dalam setiap kongresnya ataupun kegiatannya adalah munculnya seruan-seruan kepada masyarakat luas ataupun khusus kepada anggota LKN. Seruan tersebut menunjukkan sikap kebudayaan dari LKN ataupun respon terhadap peristiwa nasional dari bidang politik dan kebudayaan.

Seruan pertamanya adalah ketika LKN berdiri sekaligus menjadi kongres pertamanya pada tahun 1959 di Solo. Pandangan-pandangan LKN mengenai hubungan kebudayaan dan pendidikan; hubungan kebudayaan dengan perekonomian; hubungan kebudayaan dengan politik menjadi sumber utama terwujudnya bangsa yang lebih baik.⁵²

Salah satu perhatian khusus setelah berakhirnya kongres LKN ke-I adalah tuntutan LKN untuk dibatasinya impor film. Hal tersebut dimaksudkan LKN agar pemerintah melindungi film-film Indonesia serta memacu produksi dalam negeri untuk meningkatkan kualitasnya.

Dalam perjalanan LKN sebagai lembaga kebudayaan, aktivitasnya tidak hanya meliputi kegiatan seni melainkan juga memberi respon dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal-hal tersebut meliput berbagai segi kehidupan dari olah raga sampai politik. Hal itu dilakukan LKN sebagai bentuk kepedulian yang luas dari sebuah lembaga kebudayaan.

Usulan LKN pada awal pertumbuhannya setelah pelarangan impor film adalah menjadikan tanggal 28 Oktober sebagai hari bahasa secara nasional. LKN lewat ketua umumnya, Sitor Situmorang, menyampaikan usul tersebut kepada menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan melalui sebuah telegram.

Menjelang Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Pimpinan pusat LKN bersama ini ingin menyampaikan rasa simpati serta sokongan kepada perjuangan pimpinan dan seluruh petugas PP & K khususnya

⁵² Seruan dan tuntutan ini dapat dilihat di bab 2 yang menjelaskan berlangsungnya kongres LKN pertama di Solo dalam skripsi ini.

bidang kebudayaan untuk *nation building*, terutama tugas penyempurnaan cita-cita satu bahasa

Semoga tugas pendidikan mendapat lebih banyak perhatian dari pemerintah serta masyarakat di masa depan, baik mengenai belanja maupun isi cita-cita pendidikan.

Pula agar kiranya oleh pemerintah tgl 28 Oktober ditetapkan menjadi Hari Bahasa Indonesia sebagai hari pembuatan tekad sumpah pemuda yang bersejarah itu dalam mana sumpah satu bahasa menjadi unsur kebangsaan yang buat bersatu secara mutlak.⁵³

Hari-hari besar Indonesia, seperti Sumpah Pemuda dan juga hari kebangkitan nasional sebagai tanggal berdirinya LKN diperingati LKN bukan hanya sebagai perayaan seni, tetapi juga sebagai momentum untuk mengeluarkan seruan dan tuntutan pada pemerintah. Menjelang sumpah pemuda tahun 1962, LKN mengeluarkan seruannya tentang pendidikan. Saran-saran yang diajukan kepada Front Marhaenis ini, LKN memberikan saran-saran dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal pendidikan, LKN menyarankan agar memperhatikan pendidikan secara merata. Gejala-gejala *freefight* secara liberal harus ditanggulangi dengan kesempatan pendidikan yang lebih merata secara konsekuensi dan lebih didekati pada letak geografis.

Momentum peringatan Hari Pahlawan juga digunakan LKN untuk menyampaikan seruannya. Pada 7 November 1962, LKN menyampaikan kawat yang ditujukan kepada Menteri Sekjen Front Nasional dan Menteri Veteran. Isi dari kawat tersebut adalah agar pemerintah memperhatikan nasib para veteran perang tidak diperhatikan di banyak daerah.⁵⁴ Lewat kawat juga LKN pernah menyatakan dukungannya kepada Kuba yang berjuang melawan imperialisme.⁵⁵

Begitu pula dalam bidang olahraga tak luput sebagai peristiwa yang mendapat perhatian dari LKN. Saat ramainya Asian Games 1964 dan perhelatan akbar tersebut selesai dilaksanakan, ada ide pemberian nama “Bung Karno” pada kompleks dan bangunan Senayan yang kompleks berlangsungnya Asian Games ke-4. LKN berpendapat lewat Sitor Situmorang bahwa pemberian nama itu tepat

⁵³ “LKN Usulakn Pada Pemerintah”, Suluh, 20 Oktober 1959.

⁵⁴ “Kawat LKN”, Suluh, 7 November 1962.

⁵⁵ “LKN Dukung Kuba”, 2 November 1962.

sesuai dengan sejarah dan latar belakang usaha pendirian kompleks tersebut yang menjadi proyek mercusuar Presiden Soekarno.

Dukungan pada olahraga pernah pula disampaikan LKN pada saat tim Indonesia memenangi Thomas Cup di Tokyo. Kemenangan regu Indonesia di Thomas Cup bagi LKN dapat mengangkat gengsi Indonesia di mata dunia dan menambah pemahaman dunia terhadap kemampuan bangsa Indonesia di mata internasional.⁵⁶

Sejak awal berdirinya, LKN aktif menyerukan dan menyampaikan sikapnya lewat harian *Suluh*. Sikap-sikap itu adalah tindak lanjut dari konsepsi Marhaenisme Panglima Besar Revolusi Soekarno yang harus menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat untuk mencapai revolusi. LKN menerjemahkan konsepsi Bung Karno di ranah kebudayaan sebagai sikap dari perkembangan dan isu kebudayaan nasional. Seruan dan sikap LKN ini disampaikan lewat surat kabar milik PNI—PNI adalah induk organisasi LKN—yaitu harian *Suluh Indonesia*.

Penulis melihat setidaknya ada tiga sikap yang dikeluarkan LKN dalam rentang waktu tahun 1959 sampai 1964 yang menjadi perhatian masyarakat pada saat itu. Sikap-sikap LKN tersebut meliputi, (1) Pengertian Kebudayaan Nasional, (2) Pemboikotan Film Impor, dan (3) Lahirnya Manifes Kebudayaan.

4.2 LKN Tentang Arti Kebudayaan Nasional

Pada Kongres Kebudayaan I (pertama) di Magelang tahun 1948, Presiden Soekarno dalam pidatonya menyebutkan bahwa ‐Kebudayaan nasional, kita ini di dalam sejarah kita yang telah lampau ribuan tahun yang telah lalu, belum pernah mengalami kebudayaan nasional, tidak di zaman Belanda, tidak pula di zaman kebesaran kita sebelum zaman Belanda, tidak di zaman Sriwijaya atau zaman Majapahit.”⁵⁷ Pidato Soekarno ini menekankan kepada bangsa Indonesia untuk mencari kebudayaan nasional yang sesungguhnya.

Dalam kongres kebudayaan pertama inilah muncul ide kebudayaan nasional yang segar dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan

⁵⁶ DPP LKN ttg kemenangan regu Thomas Cup Ind”, Suluh, 23 Mei 1964

⁵⁷ Madjalah Indonesia, Sekretariat Lembaga Kebudayaan Indonesia, hlm. 13-17.

arti Kebudayaan Indonesia bahwa ‐Kebudayaan Indonesia (Nasional) ialah kebudayan, yang kini sedang kita bangun dan kita susun dari segala sari-sari dan puncak-puncak segala kebudayaan daerah di seluruh kepulauan Indonesia, baik yang asli maupun yang baru berjiwa nasional, dengan mengingat syarat-syarat yang tersebut di muka semua tadi”. Namun, ide dari Ki Hajar Dewantara itu ditentang Armin Pane dan Sutan Takdir Alisjahbana yang menolak kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Bagi angkatan Pujangga Baru, kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan bulat yang tidak terikat dengan bentuk kebudayaan lama.

Hal ini mengerucut pada tahun 1950 saat Konferensi Kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan Lembaga Kebudayaan Indonesia hasil bentukan Kongres Kebudayaan Indonesia ke-1. Dalam konferensi tersebut pokok pembicaraan fokus pada pembahasan ‐Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Asing”. Perdebatan kebudayaan inilah yang kemudian juga mendorong LKN untuk menentukan sikap dan pendiriannya dalam menentukan arah kebudayaan Indonesia.

Pada kongres ke-1 pada tahun 1959, LKN memberikan sebuah putusannya mengenai kebudayaan nasional. Sikap ini juga menjadi wujud dari implementasi pidato Presiden Soekarno tentang Manipol-Usdek pada 17 Agustus 1959. Dalam pidatonya itu, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan barat yang mengenalkan tarian ‐rock and roll”, ‐dansa a’la cha-cha, music a’la ‐ngak-ngik-ngok gila-gilaan” yang dicirikan sebagai bentuk imperialisme barat di bidang kebudayaan Indonesia.⁵⁸

Kecaman Soekarno pada kebudayaan barat itulah yang menjadi landasan LKN dalam menentukan arah kebudayaan nasional. LKN menyebut kebudayaan nasional sebagai puncak kebudayaan daerah. Definisi kebudayaan ini mirip dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara pada Konferensi Kebudayaan Pertama yang menyebut kebudayaan nasional sebagai puncak kebudayaan daerah. Namun, LKN memberi penjelasan lebih lanjut bahwa kebudayaan daerah sebagai

⁵⁸ Imperialisme kebudayaan adalah segala macam bentuk kebudayaan yang menjadi kegemaran/kebiasaan baru dari suatu bangsa yang asalnya dari asing dan sifatnya merusak dengan mendesak-menggantikan sifat-sifat asli yang baik dari bangsa dengan sifat yang buruk dari bangsa lain. Di ambil dari ‐Pendapat tentang Arti kebudayaan Nasional dan Imperialisme Kebudayaan”, Departemen P. P. dan K.

sumber yang tidak pernah kering dan sumber penggalian untuk berkembang menjadi kebudayaan nasional.

Arti kebudayaan nasional bagi LKN adalah wujud dari kepribadian bangsa. Sitor Situmorang menyebut kebudayaan sebagai perihidup manusia dalam segala pernyataan, yang baik dan sambung mneyambung; tali-temali yang merupakan kesatuan dinamis dan mendorong untuk maju.⁵⁹ Oleh karena itu, kebudayaan nasional menjadi penting karena menunjukkan kesinambungan kehidupan bangsa serta menjadi pendorong dalam kehidupan bangsa dan negara.

Satu hal yang menarik dari sikap kebudayaan nasional dari LKN adalah sikap yang tidak menolak seutuhnya kebudayaan asing sebagai kebudayaan nasional. Asosiasi musik ‐rock and roll” sebagai bentuk imperialisme tidak diartikan LKN dengan menolak seutuhnya unsur kebudayaan asing. Untuk memajukan ilmu pengetahuan LKN menyebut kebudayaan nasional dapat menerima kebudayaan asing yang baik.

Kebudayaan asing yang masuk dikategorikan menjadi dua, yaitu kebudayaan yang sifatnya membangun dan kebudayaan yang sifatnya merusak atau membahayakan. LKN menerima jenis kebudayaan asing yang sifatnya memajukan berupa ilmu pengetahuan. Akan tetapi, LKN menolak kebudayaan asing yang sifatnya merusak atau membahayakan. Contohnya, kebudayaan asing seperti paham individualisme, fasis, dan liberalisme tidak diperkenankan untuk masuk sebagai jati diri bangsa. Lebih luas lagi, contoh-contoh kebudayaan asing yang merusak adalah (a) pria-wanita yang mudah menimbulkan ekses-ekses yang amoral sebagai bentuk pergaulan bebas laki-laki dan wanita, (b) lagu-lagu panas yang mudah menjerumuskan orang ke dalam alam khayal sehingga bertindak melampaui batas-batas susila dalam pergaulan, dan (c) ilustrasi-ilustrasi dan buku-buku yang sifatnya stambul.⁶⁰

Arti kebudayaan dari LKN terbentuk dari pemikiran-pemikiran Bung Karno, yaitu Marhaenisme. Pokok-pokok pikiran dari Marhaenisme Soekarno adalah mencegah masuk paham imperialisme barat dan menjunjung nilai-nilai bangsa. Sikap itulah yang menjadikan kebudayaan nasional dari LKN adalah

⁵⁹ Juti, ‐Peranan Kebudayaan Nasional dalam Revolusi Kita”. Suluh, 19 Mei 1959.

⁶⁰ Pendapat Tentang arti Kebudayaan Nasional dan Imperialisme Kebudayaan. Departemen P. P dan K, Yogyakarta.

bentuk kebudayaan Marhaen. Kebudayaan daerah tidak mesti kebudayaan nasional, melainkan menjadi sumber ilham yang tidak akan pernah habisnya untuk dijadikan sebagai wujud kebudayaan nasional.

LKN menyatakan bahwa kebudayaan nasional yang tercipta haruslah memberi perubahan pada kemajuan. Kebudayaan nasional harus memiliki corak bangsa yang membawa pada revolusi.

Hanya perlu dinyatakan dan sudah tidak perlu dinyatakan lagi, karena setiap orang telah mengetahui. Yakni corak kebudayaan Pancasila.

Kebudayaan nasional yang membangkitkan revolusi nasional kita ini, bukan kebudayaan feodal, bukan kebudayaan borjuis, bukan kebudayaan fasis, bukan kebudayaan yang lain-lain lagi, melainkan kebudayaan Pancasila.

Kebudayaan Pancasila mempunyai lima macam sifat, yakni:

6. Kebudayaan nasional yang menjadi lawan dari kebudayaan kolonial.
7. Kebudayaan rakyat (kerakyatan), yang menjadi lawan dari kebudayaan feodal.
8. Kebudayaan sosialis, yang menjadi lawan dari kebudayaan borjuis.
9. Kebudayaan perikemanusiaan (humanisme), yang menjadi lawan dari kebudayaan fasis.
10. Kebudayaan ber-Ketuhanan yang menjadi lawan dari kebudayaan yang anti-Tuhan

Demikianlah corak kebudayaan nasional Indonesia, yang menjadi perintis jala, pendorong, pendobrak, dan pembimbing dari revolusi nasional kita sekarang ini.⁶¹

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kebudayaan nasional LKN yang bermula dari kebudayaan marhaen memiliki corak, yaitu corak kebudayaan Pancasila. Inti dari marhaen adalah pertentangan pada ideology-ideologi yang merusak bangsa. Kebudayaan nasional yang menjadi lawan kebudayaan kolonial adalah implikasi dari penolakan masuknya budaya imperialism dalam segi kehidupan bangsa. Kemudian kebudayaan rakyat di kontraskan dengan kebudayaan feodal. Bagi LKN feodal adalah tradisi bangsa yang harus dihilangkan agar tidak menjadi kebudayaan nasional dan kepribadian nasional. Dua pernyataan awal ini adalah pokok pengertian dari kebudayaan nasional dari

⁶¹ Juti, -Peranan Kebudayaan Nasional dalam Revolusi Kita, *Suluh*, 19 Mei 1959.

LKN. Kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan lama atau tradisi dapat menjadi kebudayaan nasional, kecuali kebudayaan feodal.

Lalu, tiga uraian selanjutnya adalah tiga sila inti sari pancasila. Indonesia dengan marhaenisme adalah perjuangan untuk rakyat, buruh, dan masyarakat miskin lainnya yang disebut dengan sosialisme ala Indonesia. Bentuk kebudayaan Indonesia lewat pokok ketiga menekankan kebudayaan sebagai alat revolusi. Kebudayaan sebagai bagian dari revolusi harus memperjuangkan kaum marhaen—buruh, tani, dan masyarakat miskin lainnya—sehingga tidak mengabdikan diri pada tuan tanah yang tak berpihak, yaitu mereka yang disebut kaum borjuis.

Pancasila sebagai ideologi bangsa juga harus menjadi ideologi untuk semua sendi kehidupan. Oleh karena itu, pengertian kebudayaan nasional yang identik dengan kebudayaan marhaen dari LKN tetap akan bermula pada kebudayaan pancasila. Dalam perbincangan antropolgi, Peransi menyebut Pancasila adalah suatu yang lengkap dan kokoh dalam menuturkan inti dan pokok-pokok yang mengembangkan sutau pandangan pada manusia.⁶² Kebudayaan sebagai hasil kreasi manusia bukan saja bersifat teoretis melainkan adalah praktik-praktik kehidupan. Untuk mencapai kebudayaan nasional maka perlu diciptakan manusia-manusia yang memahami Pancasila secara utuh.

Pancasila membawa manusia pada manusia-manusia baru yang akan merealisasikan kehidupan secara vertikal dan horizontal. Corak kebudayaan Pancasila dalam realisasi hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) digambarkan pada poin kelima, yaitu kebudayaan nasional yang ber-Ketuhanan. Pancasila pun mengajarkan manusia untuk memiliki kash saying sehingga dapat menciptakan kebudayaan yang memiliki nilai perikemanusiaan, bukan kebudayaan yang fasis.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sikap LKN tentang arti kebudayaan nasional adalah merujuk pada kebudayaan marhaen. Kebudayaan Nasional pun harus berpegang pada Pancasila, karena kebudayaan marhaen sebagai landasan kebudayaan nasional dari LKN berpedoman pada pancasila. Selanjutnya, LKN mengartikan proses dari kebudayaan nasional adalah sebagai

⁶² D. A. Peransi, ebudayaan dan Sosialisme Pancasila". Suluh, 20 Juli 1962.

puncak kebudayaan daerah/tradisi daerah juga kebudayaan asing yang diterima masuk karena dapat membawa kemajuan bangsa.

4.3 Sikap LKN pada Pemboikotan Film Asing

Perjuangan LKN yang pertama di ranah perfilman Indonesia dimulai saat kongres LKN pertama berakhir. Dalam kongres tersebut diputuskan bentuk usaha LKN dalam perfilman dengan penolakan film-film impor sebagai bentuk perlindungan produksi film dalam negeri. Perfilman Indonesia mendapat perhatian khusus bagi LKN sehingga selalu menjadi putusan kongresnya baik yang pertama maupun yang kedua.

Film sebagai alat propaganda paling efektif yang dapat menyampaikan pesan lewat suara, gerak, dan gambar mampu melemahkan kebudayaan Indonesia. LKN sebagai mesin kebudayaan yang mendukung pancasila haruslah menjaga Indonesia dari bentuk imperialisme apapun, termasuk film. Wajar bila film sangat penting sebagai objek politik, sosial, dan kebudayaan. Seperti halnya dengan pers yang tertutup untuk kepentingan asing imperialism, maka bidang yang bersifat massal sudah waktunya ditutup pula untuk kepentingan asing, termasuk film. Oleh karena itu, ketika bangsa Indonesia diserbu film impor maka LKN meminta agar impor film dibatasi. Di satu sisi LKN pun meminta mendukung perfilman Indonesia agar mutunya dapat ditingkatkan.

LKN menganggap perkembangan perfilman Indonesia tidak akan berkembang baik apabila film impor masih tetap saja berkuasa mutlak di dunia hiburan rakyat. Kondisi menjamurnya hiburan rakyat berupa film-film impor adalah bentuk semikolonial. Penghentian dominasi film asing dalam sekali pukul akan mematahkan –lingkar tak berujung” yang dihadapi oleh industri perfilman Indonesia dalam perkembangannya. Hal itu pun diharapkan mampu melaksanakan tujuan hasil-hasil Musyawarah Film Nasional.⁶³

Pemberhentian impor film yang dimaksudkan LKN bukanlah penghentian seratus persen. Impor film luar yang dilakukan cukup sekitar 10 persen dengan jaminan variasi dalam hal jenis, tema cerita, dan negara asal atas

⁶³ „Soal Dominasi film import dalam kehidupan rakyat”, Suluh, Rabu 2 November 1960.

prinsip pandangan bebas aktif. Bagi LKN hiburan rakyat pada masa itu banyak diisi oleh film.

Sitor Situmorang selaku Ketua Umum LKN mengkritisarkan kondisi perfilman Indonesia dari uraian Amir Yusuf, Ketua PPFI (Persatua Perusahaan Film Indonesia), dalam simposium film yang kedua, yaitu

Inginlah saya mengemukakan beberapa kesimpulan,
berdasarkan uraian sdr. Ketua PPFI, yaitu:

1. Industri Film Nasional yang sesungguhnya belum ada.
2. Petualangan dan liberalisme masih menjalankan peranan dalam produksi.
3. Segala peraturan pemerintah yang mengenai film belum merupakan rangkaian yang berdasarkan suatu konsep bulat tentang film.
4. Badan-badan atau lembaga-lembaga pelaksana kebijaksanaan pemerintah di bidang film seperti Dewan Film, Dana Film, Dewan Sensor Film Negara juga belum mencerminkan adanya suatu konsep film nasional.

Sinyalemen ini dalam garis besarnya saya kira dapat disetujui oleh sebagian besar kita. Sebagai komentar atas ikhtisar kenyataan itu dapatlah kita catat, bahwa: industri film Indonesia hidup senim-kamis di bawah tekanan dominasi film import.⁶⁴

Berangkat dari kondisi itulah LKN menyebutnya sebagai sebuah keadaan semikolonial. Bangsa yang telah merdeka, tetapi ternyata belum merdeka secara utuh. Hal itu dikarenakan kebutuhan bangsa yang sifatnya adalah menghibur masyarakat, berupa hiburan massal atau hiburan rakyat, masih harus mendatangkannya dari luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki teater rakyat yang telah lama menemani dan menghibur rakyat.

Perfilman Indonesia sebagai sebuah wujud kecil pembentukan kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional menjadi wajib dijaga. Dominasi barat secara nyata akhirnya terlihat jelas dengan banyak film impor yang menguasai pasar Indonesia dan disukai oleh masyarakat. Sitor pun tak enggan menyebut bahwa sembilan dari sepuluh film impor itu tidak baik. Artinya, sembilan puluh persen

⁶⁴ "Membebaskan Industri film Indonesia dari Dominasi Ekonomi Semi Kolonial", Mimbar Indonesia, 10 November 1960, no. 46. Hlm 20.

dari film-film impor itu harus dipandang tidak baik bagi bangsa, atau film-film itu tidak ada gunanya bagi bangsa sehingga tidak usah dibawa ke dalam negeri.⁶⁵

Kondisi film Indonesia yang belum cukup baik tidak dapat disamakan dengan kondisi di negara-negara yang memproduksi film di luar negeri. Ketidakseimbangan produk dalam negeri yang berkualitas mengakibatkan terpinggirkan oleh keberadaan film impor. Bagi LKN beberapa film yang diimpor Indonesia bagi LKN adalah film rongsokan di negeri asalnya. Efek negatif lebih dominan diterima bangsa Indonesia.

Akibat sosialnya dan akibat kulturalnya sekarang kita tinjau secara ringkas:

1. Dominasi mutlak film luar mendesak tradisi dan daya kreasi rakyat di bidang rakyat, di kota-kota dan di desa-desa.
2. Dominasi itu pula bertendensi membendung ‐renaissens‐ kesenian rakyat dan perhatian kepada seni-seni tradisional, yang sekarang mulai meluas.⁶⁶

Dari kutipan tersebut jelas bahwa keberadaan dominasi film impor bukan saja meminggirkan karya film dalam negeri. Film impor akhirnya mengalahkan kesenian rakyat Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan pembentukan kebudayaan Indonesia yang memajukan kebudayaan daerah dan memilah kebudayaan asing. Keberadaan film impor menjadikan kebudayaan Indonesia tidak berkembang karena kebudayaan daerah terpinggirkan dan kebudayaan asing lewat film impor masuk tanpa bisa dipilah dengan baik.

Aksi pemboikotan film impor pun dimulai sehari setelah Presiden Soekarno membubarkan Manifes Kebudayaan, yaitu tanggal 9 Mei 1964. Ditandai dengan berdirinya panitia aksi boikot bernama PAPFIAS (Panitia Aksi Pengganyangan Film Imperialis Amerika Serikat). Gagasan dari panitia ini adalah untuk melaksanakan dwikora dan sebagai pelaksanaan dari Festival Film Asia Afrika pada bulan April 1964 yang bertujuan mengakhiri dominasi imperialis asing dalam perfilman nasional.⁶⁷ Aksi pemboikotan film ini adalah ujung dari usaha LKN yang terus memberikan saran kepada pemerintah, tetapi sayangnya tak

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Dwi Ariyanti, Roma. *Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950 – 1966*, Yogyakarta: Merakesumba, 2008), hlm. 254

juga direalisasikan. Saran-saran itu masuk dalam putusan kongres LKN ke-1 tahun 1959 dan kongres ke-2 LKN tahun 1963.

LKN yang tergabung bersama PAPFIAS mengatakan bahwa pemboikotan film asing adalah berangkat dari fakta peranan film imperialis Amerika di Indonesia. Film-film yang beredar di bioskop-bioskop seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 700 buah, sebanyak 100 bioskop ditutup karena kesulitan *spare part*. Abu Bakar Abdy selaku ketua bidang film LKN, dalam tulisannya dengan mengambil data angka2 statistik *careen time* menyebutkan, 65% film AS di impor oleh AMPAI, 35% film-film asing lainnya di impor oleh importir film nasional, dan 2% barulah film hasil produksi perusahaan film nasional.⁶⁸

Dengan diberhentikannya 65% impor film asing imperialis Amerika ke Indonesia, LKN merasa perlu adanya langkah-langkah baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Bagi LKN film sebagai kebudayaan bukan sekadar alat hiburan rakyat, tetapi juga sebagai alat revolusi. Pemboikotan film disambut baik dan juga harus disambut baik dengan pengisian kebutuhan rakyat. Abubakar Bady menyebut sebagai langkah membangun film nasional yang progresif.

Bagi Abubakar Abdy langkah-langkah progresif dalam perfilman nasional haruslah disediakan oleh pemerintah. *Pertama*, pemerintah perlu memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat bidang film dan alat-alat film. Permohonan bantuan dari pemerintah itu adalah wujud dari menagih janji Menteri Adam Malik yang bersedia membantu jika boikot film berjalan baik. Bantuan kedua adalah mengadakan perjanjian dengan negara sehabat yang dapat bekerja sama dengan Indonesia di bidang perfilman. *Ketiga*, LKN meminta pemerintah membangun atau menyerahkan kepada pihak swasta untuk mendirikan *assembling screen projector* di Indonesia. *Keempat*, apabila masih perlu untuk mengimpor film asing, maka impor masih dapat dilakukan dengan pengawasan tema agar sesuai dengan tema revolusi Indonesia. Impor film pun tidak didominasi oleh pemodal asing seperti AMPAI. *Kelima*, Perusahaan Film Negara (PFN) dapat dijadikan tempat latihan kader-kader film. Pemerintah pun diharapkan memberi bantuan dan fasilitas untuk mendirikan studio-studio

⁶⁸ „Perfilman Indonesia Tempuh Jalan Baru”, Suluh, 8 Juli 1964.

film nasional di berbagai daerah. *Keenam*, Abubakar Abdy memandang perlu adanya undang-undang pokok perfilman nasional yang progresif.⁶⁹

Perfilman yang progresif adalah perfilman Indonesia yang bertujuan membakar semangat revolusi. Tema dan pesan yang diangkat mengangkat kebudayaan Indonesia dan lepas dari cengkeraman imperialism. Sitor Situmorang menyebut pokok-pokok yang harus ada dalam perfilman nasional yang progresif.

Pokok politik perfilman nasional yang progresif harus melihat tiga tujuan strategis:

1. Melenyapkan dominasi film oldefos.
2. Menciptakan undang-undang Pokok Perfilman sebagai pelaksanaan isi sosial budaya dari revolusi kita.
3. Mengembangkan dasar-dasar A-A dalam perfilman internasional.⁷⁰

Dari kutipan di atas, maksud dilenyapkan film oldefos adalah dengan menghentikan impor film asing, terutama lewat dominasi modal asing dari AMPAI. Mengembangkan dasar-dasar A-A adalah wujud untuk menguatkan solidaritas Asia Afrika untuk melawan kekuatan imperialisme dalam segala bidang.

LKN mengikuti perkataan Bung Karno yang menyebut masalah film adalah masalah politik maka LKN merasa perlu untuk membuat langkah politik untuk membendung film asing. Hal inilah yang menyebabkan LKN menolak ikut serta dalam Festival Film Asia karena Taiwan⁷¹ ikut serta. Film sebagai alat revolusi pun harus memerhatikan segala persoalannya, baik pembangunan industri, tema cerita, konsepsi, maupun hubungan internasional sesuai dengan revolusi Indonesia. Hubungan internasional Indonesia pun dilandasi pada perkembangan solidaritas nefo.

Bagi LKN aksi boikot film asing imperialisme dirasakan sebagai romantika revolusi. Oleh karena itu, LKN menyambut luar biasa ketika akhirnya aksi boikot yang dimulai tanggal 9 Mei 1964 mencapai targetnya. Target itu adalah dilumpuhkannya AMPAI secara total aktivitasnya pada tanggal 17 Agustus

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ "Meninggikan Nilai Artistic Film Indonesia", Suluh, 13 Maret 1964.

⁷¹ Taiwan adalah negara yang memiliki kedekatan dengan Amerika dan menjadi musuh karena imperialismenya.

1964 oleh Departemen Penerangan tepat pada hari lahirnya TAVIP. Tidak mengherankan apabila Bung Karno menyebut keberlangsungan Festival Film Asia Afrika (FFAA) sebagai kemenangan dalam negeri.

4.4 LKN dan Manifes Kebudayaan

Manifes Kebudayaan lahir sejak diumumkan pada majalah "Sastra" No. 9/10 tahun 1963. Kemunculannya adalah bentuk reaksi dari para sastrawan dan budayawan yang menolak kebudayaan dijadikan sebagai alat politik ataupun perjuangan.

LKN bersama Lekra adalah motor penggerak organisasi kebudayaan paling agresif ketika muncul penolakan dari golongan Manifes Kebudayaan. Penolakan pun datang dari organisasi lain yang bergabung bersama LKN dan Lekra, yaitu Lembaga Seniman dan Kebudayaan Indonesia (Lesbi), Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi), Himpunan Seni Budayawan Indonesia, Konperensi Pengarang Asia-Afrika (KPAA), dan organisasi lainnya.

Penolakan LKN terhadap Manifes Kebudayaan ini dilakukan di banyak daerah dengan sebuah surat dan seminar. Di Yogyakarta misalnya, LKN bersama Lekra, Lembaga Kebudayaan Muslimin Indonesia dan PWI Yogyakarta mengeluarkan sebuah pernyataan bersama terhadap Manifes Kebudayaan dan Konferensi Karyawan dan Pengarang se-Indonesia (KKPSI).

Lembaga Kebudayaan tsb berpendirian bahwa setiap kegiatan kebudayaan harus diabdikan kepada revolusi menuju masyarakat sosialis Indonesia. Dan selanjutnya menyatakan:

1. Menolak dan menentang apa yang dinamakan "Manifes Kebudayaan"
2. Menentang Konperensi Karyawan Pengarang se-Indonesia
3. Hanya mengakui Manipol RI yang hakikatnya menggariskan politik kebudayaan.⁷²

Penolakan yang sama diungkapkan enam organisasi kebudayaan yang tergabung dalam "Majelis Musyawarah Kebudayaan Surabaya". Enam organisasi tersebut ialah LKN, Lekra, Lesbumi, Lesbi, OKRA, dan HSBI yang

⁷² "Tolak", Suluh, 5 Maret 1964.

ditandatangani oleh panitera umum MMKS Sanjoto Suwito. MMKS menolak kehadiran Manifes Kebudayaan karena Manifes Kebudayaan tidak memuat apapun yang dibutuhkan oleh revolusi, bahkan memusuhi revolusi dan persatuan bangsa.⁷³ Manifesto Politik tetaplah harus digunakan sebagai satu-satunya haluan bagi kehidupan kebudayaan nasional Indonesia. Semua seniman harus membenci musuh-musuh revolusi dan harus mncintai tenaga-tenaga revolusi yang berporos pada nasakom.

Hal dasar yang menjadikan Manifes Kebudayaan diperangi oleh LKN adalah sikap yang dianut mengenai kebudayaan dan fungsi seni. Dengan paham Humanisme Universalnya, Manifes Kebudayaan ingin melepaskan seni dari belenggu kepentingan apa pun, termasuk sebagai alat politik. Pernyataan ini bertentangan dengan fungsi seni dari LKN yang berorientasi pada masyarakat. Bagi LKN, integrasi dengan rakyat terutama buruh dan tani sebagai sokoguru revolusi sedekat-dekatnya adalah kewajiban pengarang untuk diungkapkan dalam karyanya.

Paham humanisme universal yang dianut Manifes Kebudayaan sebenarnya telah lama mendapat serangan dari lembaga kebudayaan yang berpegang pada “seni untuk rakyat”. Saat itu H.B. Jassin mendapat serangan bertubi-tubi dari Lekra. Sitor Situmorang pun turut menyerang H. B. Jassin yang saat itu belum lahir Lembaga Kebudayaan Nasional. Serangan lembaga kebudayaan di bawah komando Partai Nasional Indonesia keluar lewat lembaga kebudayaan marhaenis ataupun LKN daerah.

Sitor Situmorang bahkan mengatakan Manifes Kebudayaan telah lahir sejak lama. Bukan saja dalam bentuk paham kebudayaan humanisme universal, tetapi juga dalam gerakan politik. Peristiwa Manifes Kebudayaan tidak dianggap sebagai peristiwa kebetulan yang muncul dari kegelisahan sastrawan atau kebudayaan yang tidak ingin masuk politik. Manifes Kebudayaan adalah anasir-anasir yang muncul dari pertentangan pada konsep Manifesto Politik yang dilahirkan Presiden Soekarno tahun 1957. Gerakan politik itu menyebut dirinya

⁷³ „Tolak! Manifes Kebudayaan”, Suluh, 21 Februari 1964.

sebagai Liga Demokrasi yang mencoba menentang konsepsi Presiden Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya.⁷⁴

Humanisme Universal pun dianggap menguntungkan imperialisme. Padahal, imperialisme adalah hal yang sangat dilarang oleh Presiden Soekarno. Dalam pidatonya Presiden Soekarno selalu melarang masuknya budaya barat seperti musik ‐ngak ngek ngok‐. Keberpihakan Humanisme Universal pada imperialisme inilah yang bertolak belakang dengan Manifesto Politik Presiden Soekarno yang dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Humanisme Universal sebagai paham yang dianggap imperialisme pun membawa Manifes Kebudayaan sebagai cabang kebudayaan imperialisme. Garis imperialisme inilah yang menegaskan pemisahan garis perjuangan Manifes Kebudayaan dengan LKN. Garis perjuangan Manifes Kebudayaan yang tak melekatkan karya untuk rakyat dan hanya untuk kepentingan seniman yang berpegang pada nilai-nilai keindahan dianggap mengkhianati rakyat.

Kebudayaan imperialis dianggap dapat merusak kebudayaan nasional yang sedang diperjuangkan. Kebudayaan nasional yang digalakkan dengan gigih dapat kalah dengan kebudayaan imperialis. Presiden Soekarno menyebut kebudayaan imperialis yang melenakan itu dalam kebudayaan borjuis, imperialis, fasis, dan feodalisme. Hal ini diungkapkan oleh Bagin selaku sekjen LKN dalam tulisannya,

Kebudayaan imperialis yang dimasukkan ke Indonesia jelas melikwidir kebudayaan nasional Indonesia, setidaknya memandekkan perkembangan kebudayaan nasional. Karena bangsa yang berkebudayaan nasional sangat sukar dijajah, termasuk sukar untuk menjajah jiwa rakyat dan kekayaan buminya (Elsenr gurunyan Chopin pernah menyatakan ini. Dan kebudayaan imperialis memang memusuhi Manipol. Manifes Kebudayaan juga mengaburkan Manipol. Kesimpulannya, Manifes Kebudayaan adalah cabang kebudayaan imperialis yang berpusat di luar negeri⁷⁵

Dari pernyataan Bagin tersebut, jelas menyebutkan bahwa Manifes Kebudayaan adalah musuh manipol. Manifes Kebudayaan sebagai sebuah manifes ingin menyandingkan dirinya dengan manifes yang ada. Manifesto Politik dari

⁷⁴ ‐Integrasi Pengarang dan Rakyat‐, Suluh, 1 April 1964.

⁷⁵ ‐Manikebu adalah Cabang Kebudayaan Imperialis di Indonesia‐, Suluh, 14 Mei 1964.

Presiden Soekarno yang mencoba disandingkan dengan Manifes Kebudayaan inilah yang menjadikannya musuh. Manifesto Politik sebagai sebuah konsepsi dari Presiden Soekarno lahir dari pidatonya untuk dijadikan landasan perjuangan negara Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin. Segala hal yang mencoba berbeda, melawan, ataupun menyandingkan diri dengan Manipol adalah sebuah sikap kontrarevolusioner. Oleh karena itu, Manifes Kebudayaan dimusuhi karena bersikap kontrarevolusi dengan menyandingkan diri dengan konsepsi yang sudah diberikan Panglima Besar Revolusi, Presiden Soekarno.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PWI Pusat, A. Karim DP, yang menyatakan bahwa manifes Kebudayaan adalah antimanipol dan berusaha menandingi Manifesto Politik.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat A. Karim D. P. Denga tegas telah mengecam Konperensi Karyawan Pengarang Indonesia yg disponsori oleh kaum ‐Manifes Kebudayaan”, bahwa agaknya dengan ‐Manifes Kebudayaan” itu mereka hendak menciptakan manifes yang lain di samping manifesto Politik Bung Karno.⁷⁶

Karim menyebut KPPSI juga sebagai manipol karena mendapat dukungan dari Manifes Kebudayaan dalam pelaksanannya. Selanjutnya Karim menyebut bahwa Manifes Kebudayaan hanyalah organisasi berselimut kebudayaan.

Apakah tulisan2 mereka yang membela ‐Manifes Kebudayaan” yg hendak menciptakan tandingan bagi Manipol dengan berselimut ‐kebudayaan”, bukan tulisan yang justru tidak konstruktif, tulisan yang destruktif menjurus kekontrarevolusi?⁷⁷

Dari pernyataan tersebut, sangat jelas maksud dari pertentangan Manifes Kebudayaan terhadap Manipol. Ada upaya-upaya destruktif yang dilakukan Manifes Kebudayaan untuk menandingi Manipol. Baik itu dilakukan lewat tulisan yang disampaikan oleh Karim, maupun lewat seminar atau karya yang sastrawan Manifes Kebudayaan yang tak menyuarakan suara rakyat.

⁷⁶ ‐Integrasi Pengarang dan Rakyat”, Suluh, 1 April 1964.

⁷⁷ *ibid*

LKN juga menyebut bahwa penolakan dan keragu-raguan Manifes Kebudayaan pada Manipol turut pula merambah pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Manifes Kebudayaan menyebut diri mereka menerima Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sumber kebudayaan.

MANIFES kami ini akan membuktikan dgn seterang2nya bahwa kami bukanlah pelarian kaum politisi yang berlindung dibalik topeng kebudayaan karena bagi kami kebudayaan tidaklah merupakan subordinasi politik, dan oleh karena itulah kami bukan politisi, melainkan karyawan yang sebagai konsekuensi jd tak mungkin kami hindari bermaksud mengamankan Revolusi Indonesia dgn cara jd defensif saja, tetapi terutama dgn cara jd sekreatifnya. Oleh karena itu tidaklah perlu dihernakan apabila kami berlandaskan PANCASILA sbg flasafah kebudayaan kami.⁷⁸

Dari kutipan di atas jelas pertentangan-pertentangan yang terlihat dengan LKN. Manifes Kebudayaan menyebut bahwa kebudayaan bukanlah subordinasi dari politik. LKN berbicara sebaliknya dengan menyebut bahwa sastrawan juga politikus. Begitu pula ketika Manifes Kebudayaan dianggap berlindung dari Pancasila yang digunakannya sebagai landasan kebudayaan. Dari pernyataan tersebut bahwa Manifes Kebudayaan tidak memperlihatkan keragu-raguan pada Pancasila. Hal yang menjadi perlawanan adalah ketika Manifes Kebudayaan mengatakan bahwa kaum atheis tidak mungkin menerima Pancasila. Sitor Situmorang menangkalnya dengan menyebutkan,

Pancasila itu sebagai dasar persatuan garis politik dari seluruh potensi nasional. kalau hanya diukur dari segi ber-Tuhan atau tidak ber-Tuhan, maka jelaslah bahwa Daun Bureruh, Karto Suwiryo, Kahar Muzakkar adalah orang-orang yang berTuhan dan mengamalkan syariat agama.

Tapi siapakah yang bisa menerima untuk dibenarkan bahwa mereka itu menerima Pancasila? Itulah maka alasan ber-Tuhan atau tidak ber-Tuhan saja tidak bisa dijadikan ukuran tentang menerima atau menolak Pancasila. Mereka harus diingatkan sebenarnya, bahwa yang dimaksud dalam menerima Pancasila, ialah dukungan politik dari semua

⁷⁸ Wiratmo Soekito, H.B. Jassin, dan Bokor Hutasuhut, "Sebuah Manifes Kebudayaan", 17 Agustus, hlm. 1. Tulisan dapat dilihat di Pusat Dokumentasi H. B. Jassin

kekuatan masyarakat terhadap Pancasila itu dengan Manipol sebagai landasan kerja revolusi.⁷⁹

Dari kutipan di atas jelaslah bahwa Pancasila yang dibawa Manifes Kebudayaan hanyalah topeng belaka yang mengharapkan agar tetap berpegang pada ajaran Presiden Soekarno. Bahkan, menjadi kontradiksi saat Manifes Kebudayaan menolak manipol, tetapi menerima pancasila sebagai dasar pergerakan. Hal ini disebabkan oleh yang dimaksud LKN dengan penerimaan Pancasila adalah dengan menggunakan Manipol sebagai landasan kerja revolusi. Manifes Kebudayaan pun seharusnya menjadikan Manipol sebagai landasan kerja jika menerima Pancasila. Namun yang terjadi sebaliknya, Manifes Kebudayaan justru menolak konsepsi Manipol.

Menurut Sitor Situmorang upaya yang dilakukan Manifes Kebudayaan dengan menempatkan Pancasila dalam manifesnya yang diartikan tidak dapat diterima oleh kaum atheis adalah upaya pengungkitan kebenaran dari Pancasila. Bahkan dianggapnya, upaya pengungkitan dan ujicoba kebenaran dari Pancasila telah dilakukan sebelum lahir Manifes Kebudayaan melalui kaum kontrarevolusioner. Cara-cara pengungkitan Pancasila itu dilakukan dengan seminar-seminar yang membahas Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa.⁸⁰ Padahal, bagi rakyat Indonesia Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu diutak-atik lagi. Sitor menyebutnya, “sama halnya dengan hukum yang sepuluh bagi umat Kristiani yang tidak akan pernah menseminarkannya”⁸¹.

Zekse, anggota sekretariat KKPI, bahkan menyebut aksi Manifes Kebudayaan ini berselimut kebudayaan.⁸²

Kalau kita mengatakan bahwa Manifes telah dijadikan selimut oleh “budayawan” dan “pengarang” petualang, bukanlah berarti kita menolak pancasila sebagai falsafah kebudayaan. Jauh sebelum Manifes Kebudayaan diciptakan, kita telah menganut Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa dna negara, baik bidang kebudayan, politik dan ekonomi. Pancasila jiwa kita dan iapun telah kita amalkan dalam

⁷⁹ “Integrasi Pengarang dan Rakyat”, Suluh, 1 April 1964.

⁸⁰ *ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² “Petualang2 Kebudayaan dan Kepengarangannya”, Suluh, 7 Maret 1964.

kehidupan kita. Hanya orang2 petualang yang merasa perlu untuk maksud2 dan tujuan yang profitble –meyakin-yakinkan” diri mereka bahwa –Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami” karena orang semacam itu sebenarnya masih belum yakin pada Pancasila dengan sesungguhnya.⁸³

Dari kutipan di atas jelas bahwa yang dilakukan pihak Manifes Kebudayaan justru memperlihatkan keragu-raguannya pada Pancasila sebagai falsafah hidup termasuk kebudayaan. Zekse bahkan menyebut mereka sebagai –budayawan” dan –pengarang” petualang. Ciri khas petualang yang dimaksud adalah sikap berbuat apa saja demi mendatangkan keuntungan bagi pengarang atau budayawan tanpa memperhitungkan moral dan prinsip yang dipegang. Hal-hal yang menjadi pikiran petualang selalu berlawanan dengan ucapan. Pikiran, ucapan, dan tindakan selalu bertentangan satu sama lain bagi seorang petualang. Pertentangan itu akan berubah seiring dengan waktu dan tempat petualang melakukan operasi dan aksinya.

Istilah –pengarang petualang” muncul dari Zakse setelah melihat adanya kemunafikan dalam Konperensi Karyawan Pengarang se-Indonesia di dalam konferensi tersebut. Telah diketahui bahwa konferensi tersebut dihadiri dan disponsori oleh mereka yang tergabung dalam Manifes Kebudayaan.

Begitu pula ketika Manifes Kebudayaan tidak ingin melibatkan politik dan kebudayaan secara bersamaan. Bagi Manifes Kebudayaan kebudayaan bukanlah subordinasi dari politik. Mereka pun menyebut diri mereka bukanlah politikus, tetapi karyawan kebudayaan. Sikap itulah yang kemudian dikecam oleh LKN. Penyebutan karyawan dianggap mengaburkan penafsiran bahwa Manifes Kebudayaan tidaklah terlibat dan bercorak politik kepartaihan. Namun, muncul corak lain, yaitu fasisme yang justru memiliki persamaan dengan Liga Demokrasi.

Bagi LKN, sikap tidak menyatukan kebudayaan dengan politik adalah sikap tidak mau tahu nasib buruh dan tani Indonesia. Untuk sekadar tahu saja tidak apalagi ikut terlibat dalam perjuangan membantu kaum buruh dan tani. LKN menyebut Manifes Kebudayaan tidak ikut memperjuangkan nasib buruh dan tani

⁸³ *ibid*

karena bidang itu tidaklah masuk dalam ranah kebudayaan, melainkan ranah perjuangan politik.

Berbeda halnya dengan Manifes Kebudayaan, sebagai lembaga kebudayaan yang mengidentikkan dengan lembaga kebudayaan progresif, pemisahan kebudayaan dan politik adalah mustahil. Kaum buruh dan tani adalah rakyat dalam pandangan LKN. Tujuan seni dari LKN pun adalah untuk memperjuangkan rakyat dan menjadikan rakyat sebagai sumber ilham yang tak akan pernah habis-habisnya. Memperjuangkan rakyat dalam seni adalah dengan menjadikan rakyat sebagai sumber inspirasi sebuah karya. Juga dengan menjadikan sebuah karya untuk memberi semangat rakyat dalam perjuangan revolusi. Maka, selalu mengaitkan buruh dan tani dalam setiap karya dan perjuangan kebudayaan adalah kewajiban dari LKN. Setiap perjuangan kebudayaan yang tak melibatkan rakyat adalah kontrarevolusioner.

Perjuangan kebudayaan dengan melibatkan rakyat adalah sebuah bentuk progresivitas kebudayaan. Pelibatan rakyat dalam ranah perjuangan dan barisan perjuangan adalah bentuk dari revolusi. Mereka yang tak melibatkan rakyat dalam perjuangan disebut sebagai kontrarevolusi, termasuk Manifes Kebudayaan. Sitor menyebut pelibatan rakyat ini sebagai kewajiban pengarang dan budayawan untuk berintgrasi.

Kewajiban pengarang dan budayawan sekarang ini, ialah supaya mengintegrasikan diri dengan rakyat, terutama tani dan buruh, seperti apa yang telah dimulai oleh PWI. Dalam hal ini bukan hanya berarti seniman2 itu turun ke desa atau turun ke bawah sekadar ”show”, tapi turun ke persoalan rakyat itu, lalu menjadi satu dengan mereka untuk mengolah persoalan bersama2.⁸⁴

Maksud dari kutipan di atas adalah bentuk penjelasan pelibatan rakyat dalam setiap perjuangan. Bahkan, maksud dari turun ke jalan pun menjadi arahan bagi budayawan dan pengarang LKN agar rakyat bukan sekadar bentuk eksistensi atau ”show” saja, tetapi benar-benar mendalami persoalan rakyat dalam

⁸⁴ „Integrasi Pengarang dan Rakyat”, Suluh, 1 April 1964.

perjuangan. Oleh karena itu, Manifes Kebudayaan yang tidak melibatkan rakyat dalam manifesnya adalah sebuah hal yang harus dilawan oleh LKN.

Penolakan Manifes Kebudayaan pada Manipol memperjelas garis kebudayaan yang kontras dengan Lembaga Kebudayaan Nasional. LKN menganggap Manifes Kebudayaan kontrarevolusi karena tidak ingin mengabdikan seni untuk kepentingan revolusi. Hal ini nampak dari penjelasan Sitor Situmorang mengenai Manifes Kebudayaan.

Apakah isi Manifes Kebudayaan itu?

Secara ringkas dapat dicatat yang berikut: Kami Manifes Kebudayaanis tidak setuju sistem dan strategi politik yang dibangun Bung Karno.

Manifes Kebudayaanis memberi tafsir kontrarevolusioner kepada gagasan Bung Karno dengan seakan-akan mendukung falsafah politik Bung Karno, sementara menggerogoti tindakan dan garis politiknya.

Dengan lain perkataan: kaum Manifes Kebudayaanis dengan melahirkan apa yang dinamakan ‐MANIFES KBUDAYAAN”, hendaknya mengkoreksi Bung Karno, berkata MANIFESTO POLITIK memang bidang Bung Karno, tapi di sampingnya perlulah suatu MANIFESTO KEBUDAYAAN, di bawah pimpinan ‐budayawan”.⁸⁵

Dari penjelasan Sitor Situmorang sangat jelas keberadaan Manifes Kebudayaan yang kontrarevolusioner. Kedudukannya Manifes Kebudayaan yang coba menyandingkan diri dengan Manifesto Politik Bung Karno adalah sebuah upaya kontra pada perjuangan revolusi. Padahal, bagi Bung Karno, ‐kebenaran revolusi bahwa dalam revolusi, politik adalah kebudayaan, artinya politik yang revolusioner adalah menjadi bagian mutlak dari kebudayaan orang-orang revolusioner. Jadi sastra, seni, film dan sebagainya tidak bisa lepas dari penilaian-penilaian dan hukum revolusi dalam kehidupan barisan dan orang-orang revolusioner”. Oleh karena itu, Manifes Kebudayaan pun tidak menyukai dampak dari pengabdian seni untuk kepentingan revolusi, yaitu semboyan ‐menghalalkan segala cara”. Penolakan tersebut terlihat dari naskah Manifes Kebudayaan, yaitu

⁸⁵ Sitor Situmorang, ‐Pancasila sebagai Jiwa Kebudayaan”, Suluh, 17 Juni 1964.

Demikianlah umpamanya di bidang penciptaan kerja-kerja kesenian dimana orang lebih mementingkan aspek propaganda daripada aspek kesusastraan, adalah contoh pelaksanaan dari semboyan “The End Justifies and The Means”—apabila orang mengemukakan apa yang bukan kesusastraan sebagai kesusastraan, apa yang bukan kesenian, apa yang bukan ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan dsb.

Perkosaan seperti itu bukanlah cara insaniah, melainkan cara alamiah. Perkosaan adalah mentah sedang penciptaan kerja mengalahkan kementahan dengan cara manusia untuk menciptakan dunia yang damai, dimana dapat dilakukan pendidikan yang paling sempurna. Kesenian sebagai penciptaan kerja manusia akan abadi hanya apabila bukan saja tujuan adalah kemanusiaan, tetapi juga caranya adalah kemanusiaan, dan itulah demokrasi yang kami perjuangkan secara prinsipil.⁸⁶

Dari kutipan di atas, Manifes Kebudayaan secara jelas menolak sikap menghalalkan segala cara untuk mengabdikan seni pada politik. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk pemerkosaan pada karya. Argumentasi Manifes Kebudayaan yang menyebut tindakannya sebagai aksi cinta damai pun tertolak oleh LKN. Indonesia bagi LKN sudah memiliki pendirian cinta damai sehingga tidak perlu meragukan sikap menghalalkan segala cara. LKN mengakui diri juga cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.

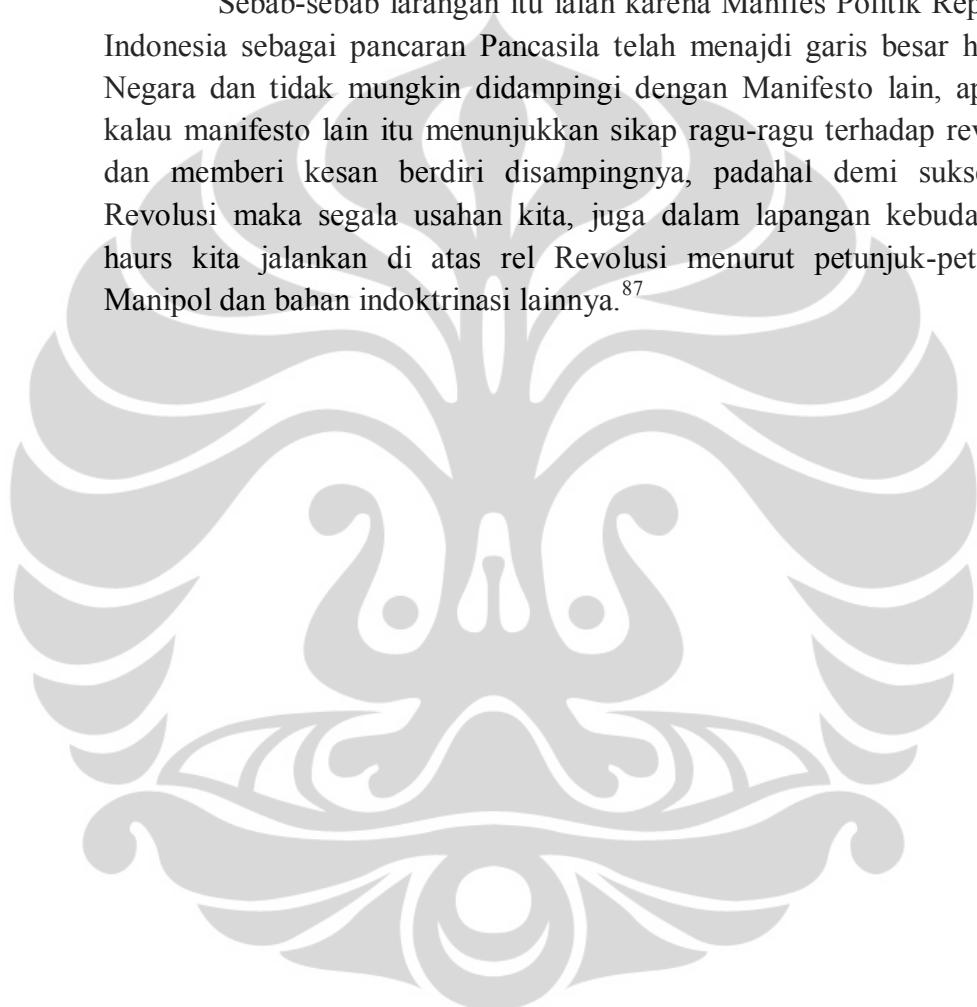
Dalam hal ini, keadaan Indonesia yang belum merdeka secara utuh memungkinkan untuk melakukan segala cara demi mendapatkan kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan yang dimaksud dalam konsep Manipol adalah bukan sekadar merdeka mengibarkan merah putih, tetapi Indonesia dapat menguasai kembali kekayaan bumi Indonesia yang dikuasai oleh kaum imperialis. Untuk mencapai kemerdekaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan dimungkinkan bagi LKN untuk menghalalkan segala cara sampai tercapai hasilnya.

Keberadaan Manifes Kebudayaan pun tidak berlangsung lama. Sikapnya yang dianggap kontra revolusi dan antimanipol menarik perhatian Panglima Besar Revolusi, Presiden Soekarno. Hal-hal yang bersifat antimanipol dan kontrarevolusi sejak awal memang tidak mendapat tempat di Indonesia sejak Presiden Sorkarno mengeluarkan Manifesto Politiknya tahun 1957. Manifes

⁸⁶ “Manifes Kebudayaan”, hlm. 3. Naskah asli Manifes Kebudayaan terdapat di Pusat Dokumentasi H. B. Jassin.

Kebudayaan pun yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1963 dinyatakan terlarang langsung oleh Presiden Soekarno pada tanggal 8 Mei 1964. Pelarangan tersebut dilakukan karena Manifes Kebudayaan dianggap dapat melemahkan perjuangan revolusi bangsa Indonesia di bawah pimpinan Panglima Besar Revolusi Presiden Soekarno.

Sebab-sebab larangan itu ialah karena Manifes Politik Republik Indonesia sebagai penceran Pancasila telah menjadi garis besar haluan Negara dan tidak mungkin didampingi dengan Manifesto lain, apalagi kalau manifesto lain itu menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi dan memberi kesan berdiri disampingnya, padahal demi suksesnya Revolusi maka segala usahan kita, juga dalam lapangan kebudayaan, harus kita jalankan di atas rel Revolusi menurut petunjuk-petunjuk Manipol dan bahan indoktrinasi lainnya.⁸⁷



⁸⁷ Pernyataan larangan Presiden, *Warta Bhakti*, th. 54, no. 1459, 10 Mei 1964.

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Lembaga Kebudayaan Nasional atau LKN berdiri pada tanggal 20 Mei 1959. Dengan kongres yang dihadiri sebanyak 150 orang dari perwakilan lembaga kebudayaan marhaenis yang berasal dari 21 daerah propinsi. LKN terbentuk adalah tindak lanjut dari keputusan DPP PNI di bulan Desember untuk mendirikan wadah kebudayaan PNI. Pembentukan LKN oleh PNI adalah untuk mewujudkan suasana ketidakraguan PNI dalam memelopori demokrasi pancasila dalam segala sektor termasuk kebudayaan.

Pada kongres pertama ini, LKN memilih Sitor Situmorang sebagai ketua umum secara aklamasi. Dengan mengeluarkan keputusan-keputusan berupa penegasan kembali agar bangsa Indonesia kembali kepada kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak kebudayaan daerah yang bernilai dan bermutu tinggi serta hasil dari saringan budaya asing yang baik untuk bangsa Indonesia.

Perkembangan dan pertumbuhan Lembaga Kebudayaan Nasional terbilang cepat. Hal ini dikarenakan sebelum adanya LKN, PNI telah memiliki Lembaga Kebudayaan Marhaen ataupun lembaga kebudayaan sejenis di tiap-tiap daerah yang berpihak pada PNI. Oleh karena itu, ketika LKN terbentuk lembaga tersebut serta merta mengganti namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Nasional tingkat daerah masing-masing.

Data pasti jumlah cabang LKN belum bisa didapatkan, tetapi berdasarkan laporan Sitor Situmorang pada saat kongres LKN ke-2, LKN telah memiliki cabang berjumlah 175 sampai tahun 1963. Perkembangannya yang cepat disebabkan PNI adalah partai besar di Indonesia, dan telah ada lembaga kebudayaan di bawah PNI sebelum terbentuknya LKN. Dalam kerangka besar LKN masuk dalam front marhaenis dan tidak bisa dipisahkan dengan PNI. PNI sebagai induk dari front marhaenis berhak mengontrol kegiatan LKN agar sesuai dengan jalur demokrasi pancasila dalam perjuangan revolusi.

Pada kongres ke-1 LKN, kongres menghasilkan beberapa putusan menyangkut soal kebudayaan. LKN mengeluarkan slogan ‐kesenian adalah rakyat‐ dan ‐seni untuk rakyat‐. LKN berpendapat bahwa seni belum dinamakan seni apabila belum membuktikan fungsi sosialnya yang kreatif. Dari kongres ke-1 ini rakyat menjadi kata kunci dalam setiap buah karya LKN sebagai bentuk perjuangan revolusi. Dalam bidang pendidikan, LKN menyebut dasar pendidikan nasional adalah kesadaran nasional, kebanggaan nasional, dan kebangkitan nasional. Bidang ekonomi LKN mengimplementasikan perjuangannya dengan menuntut pembatasan impor film.

Perkembangan LKN terlihat ketika mengadakan kongresnya yang kedua pada tahun 1963 dan musyawarah seniman LKN pada tahun 1964. Dari kongres kedua, LKN mempertegas keberadaannya sebagai bagian dari front marhaenis. Kemudian dari musyawarah seniman LKN dihasilkan rumusan-rumusan pelaksanaan di bidang kebudayaan sebagai tindak lanjut Tahun Vivere Pericoloso yang disampaikan Presiden Soekarno dalam pidatonya.

Penegasan-penegasan LKN sebagai bagian dari front marhaenis menjadikan LKN bergerak dengan pedoman ajaran marhaenisme. Slogan dari LKN untuk kembali ke Manipol/USDEK, Pancasila, dan Revolusi adalah emanasi dari ajaran marhaenisme. Slogan-slogan itu lahir dan teraktualisasi dari konsep-konsep yang dikeluarkan dari Panglima Besar Revolusi Bung Karno.

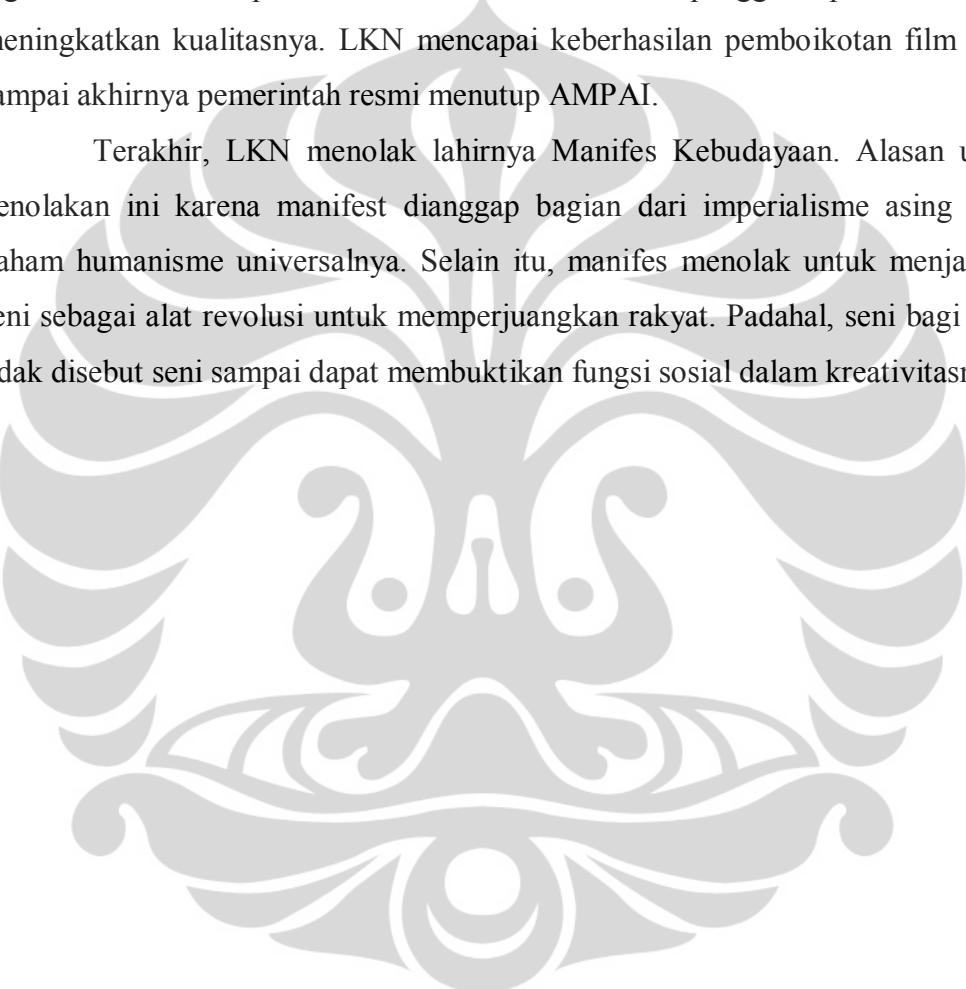
Perjuangan revolusi LKN dengan dasar ajaran marhaenisme menyebabkan keluarnya banyak sikap terkait peristiwa nasional baik sosial politik maupun kebudayaan. Seruan-seruan LKN menjadi ciri khas dalam setiap aktivitas sebagai bagian kampanye kebudayaan. Ada tiga isu besar yang direspon LKN secara aktif antara lain, arti kebudayaan nasional, pemboikotan film impor, dan lahirnya manifest kebudayaan.

LKN mengartikan kebudayaan nasional dengan merujuk kepada arti kebudayaan marhaen, yaitu kebudayaan yang berasal dari kebudayaan daerah. Oleh karena itu, kebudayaan nasional bagi LKN adalah kebudayaan marhaen. Proses kebudayaan nasional itu berasal dari puncak-puncak kebudayaan daerah atau tradisi lama. LKN juga tidak menolak kebudayaan asing seutuhnya untuk menjadi kebudayaan nasional. Kebudayaan asing dalam hal ilmu pengetahuan

yang dapat memajukan kebudayaan Indonesia. LKN menolak kebudayaan asing seperti fasisme, kapitalisme, dan imperialisme yang dicontohkan dengan musik “ngak ngek ngok”.

Dalam hal pemboikotan film asing, LKN ikut menolak serta memboikot dominasi film asing. Hal tersebut menyebabkan perfilman Indonesia tidak mendapat tempat karena belum memiliki tema yang menarik. Di satu sisi LKN juga menekankan pemerintah untuk membantu penggiat perfilman agar meningkatkan kualitasnya. LKN mencapai keberhasilan pemboikotan film asing sampai akhirnya pemerintah resmi menutup AMPAI.

Terakhir, LKN menolak lahirnya Manifes Kebudayaan. Alasan utama penolakan ini karena manifest dianggap bagian dari imperialisme asing lewat paham humanisme universalnya. Selain itu, manifes menolak untuk menjadikan seni sebagai alat revolusi untuk memperjuangkan rakyat. Padahal, seni bagi LKN tidak disebut seni sampai dapat membuktikan fungsi sosial dalam kreativitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel Surat Kabar dan Majalah

_____, Mimbar Indonesia, Djakarta, 1959-1963.

_____, Suluh Indonesia, Djakarta, 1959-1964.

Buku:

Acdhian, Andi. 2009. *Tanah bagi yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Bogor: Kekal Press.

Adam, Asvi Warman. 2004. *Soharto Sisi gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Audit, Sobron. 1964. *Derap Revolusi*. Jakarta: Lekra.

_____. 2006. *Buku yang Dipenjarakan: Memoar Orang Terbuang*. Bandung: Nuansa.

Ajoeb, Joebar. 2004. *Sebuah Mocopot Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Teplok Press.

Aria, Roma Dwi dan Muhibdin M.Dahlan (ed). 2008. *Lekra tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan harian rakyat 1950-1965*. Yogyakarta: Merkesumba.

Budianta, Eka. 2005. *Mendengar Pramoedya*. Jakarta: Atcmichademas Persada.

Budiman, Arief. 2006. *Kebebasan, negara, Pembangunan*. Jakarta: Alvabet dan Freedom Institue.

Damono, Sapardi Djoko. 1984. *Sosiologi sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta.

_____. 1999. *Politik Ideologi dan Sastra Hibrida*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Eneste, Pamusuk. 1988. *Ikhtisar Kesusastraan Indonesia Modern*. Jakarta: Djambatan.

_____. 2001. *Bibliografi sastra Indonesia*. Magelang: Indonesiatera.

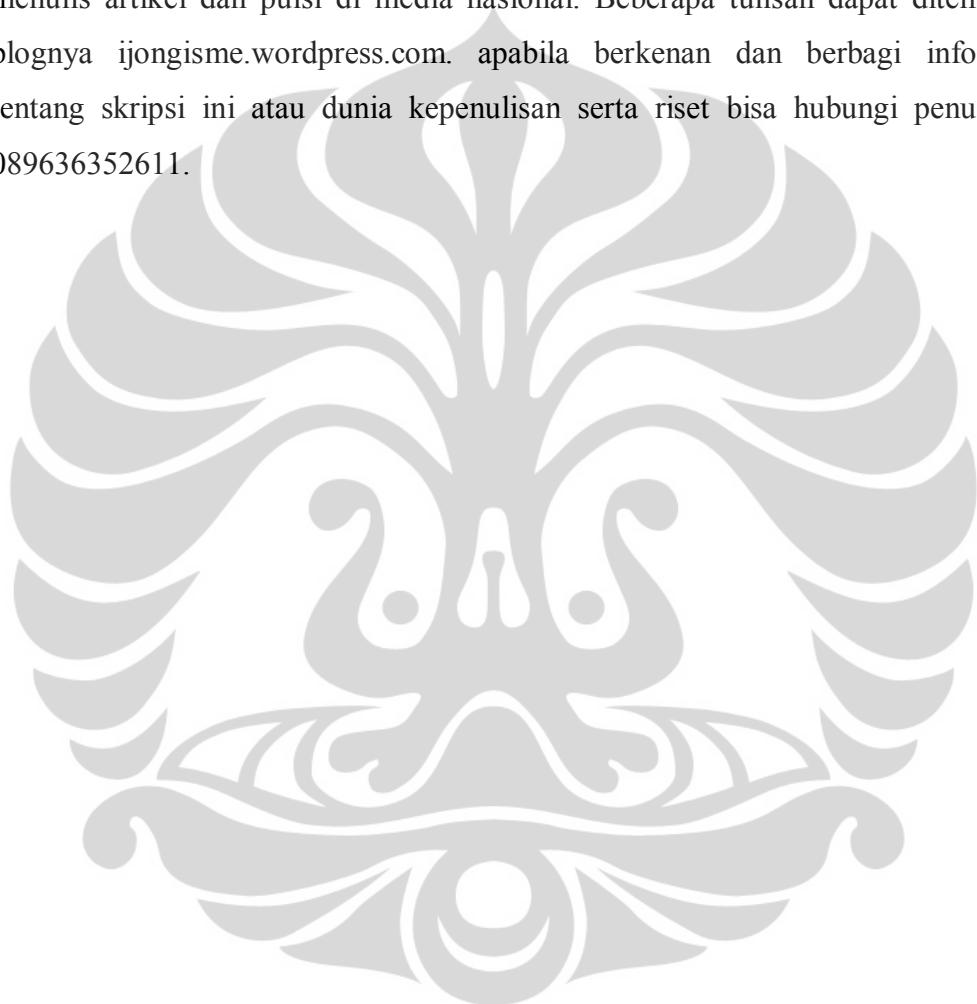
- Foulcher, Keith. 1986. *Social Commintmen in Literature and The Arts: The Indonesia “Institute People’s Culture” 1950-1965*. Australia: Centre of Southesats Asian Studies Monash University.
- _____. 1988. "Roda yang Berputar: Beberapa Aspek Perkembangan Sastra. Indonesia sejak 1965," dalam *Prisma* no. 8 tahun XVII. Jakarta: LP3ES
- _____. 1991. *Pujangga Baru: Kesusastraan dan nasionalisme di Indonesia 1933-1942*. Jakarta: Grimukti Pasaka.
- _____. 1994. *Angkatan 45: Sastra, Politik Kebudayaan dan revolusi Indonesia*. Jakarta: Jaringan Kerja Budaya.
- _____. 2000. *Sumpah Pemuda:Makna dan Proses Penciptaan atas Sebuah Simbol Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Foulcher, Keith dan tony day (ed). 2006. *Clearing a Space: Kritik Pascakolonial tentang Sastra Indonesia Modern*. Jakarta: Buku Obor dan KITLV-Jakarta.
- Heryanto, Ariel. 1985. *Perdebatan Satra Konstektual*. Jakarta: Rajawali.
- _____, 1988. "Masihkah Politik Jadi Panglima?: Politik Kesusastraan Indonesia Mutakhir", dalam *Prisma* No. 8 Tahu XVII. Jakarta: LP3ES.
- Ismail, Taufik dan D. S. Moeljanto. 1995. *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk*. Bandung: Mizan dan Republika.
- Ismail, Yahya. 1972. *Pertumbuhan, Perkembangan, dan kejatuhan Lekra di Indonesia: Satu Tinjauan dari Aspek Sosio-Budaya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ismanto, An. 2009. *Seratus Buku Sastra Indonesia yang Patut Dibaca Sebelum Dikuburkan*. Yogyakarta: Iboekoe.
- Leirissa, R. Z.tt. "Metodologi Penelitian dalam Ilmu Sejarah". Makalah.
- Lindsya, Jennifer dan Maya H. T. Liem (peny). 2011. *Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965*. Jakarta: Pustaka Larasan dan KITLV.
- Mohammad, Goenawan. 2001. *Eksotopi: Tentang kekuasaan, tubuh, dan identitas*. Jakarta: Grafiti.
- Onghokham. 2009. *Sokarno, Orang kiri, Revolusi dan G30s 1965*. Jakarta:Komunitas Bamboo.
- Ricklef, M. C. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.

- Sambodja, Asep. 2009. *Historiografi Sastra Indonesia 1960-an*. Jakarta: Bukupop.
- Ulrich, Kratz (penyusun). 1999. *Sumber terpilih: Sejarah Sastra Indonesia abad XX*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer.
- Toer, Pramoedya Ananta. 2003. *Realism Sosialis dan Sastra Indonesia*. Jakarta: Lentera Dipanjara.
- Yudiono K. S. 2007. *Pengantar Sejarah Sastra Indonesia*. Jakarta: Grasindo.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Adi Nugroho, lahir di Jakarta 25 Mei 1989. Mengabdikan dirinya pada tahun 2010 sebagai Ketua BEM FIB juga menjadi bagian dari Mahasiswa Berprestasi FIB UI 2012, lalu 2011 sebagai Wakil Ketua BEM FIB UI. Mendirikan Program Pembinaan Magma FIB UI pada tahun 2009. Aktif menulis artikel dan puisi di media nasional. Beberapa tulisan dapat ditemui di blognya ijongisme.wordpress.com. apabila berkenan dan berbagi informasi tentang skripsi ini atau dunia kepenulisan serta riset bisa hubungi penulis di 089636352611.





Kronik Peristiwa Sastra dan Sejarah LKN:

27 Desember 1949	Indonesia berdaulat secara de facto dan de jure
18 Februari 1950	Surat Kepercayaan Gelanggang lahir
4-6 Agustus 1950	Konferensi Kebudayaan, Jakarta
6 Agustus 1950	Angkatan Sastrawan 50 (ASAS 50) lahir dengan slogan ‐sastra untuk masyarakat‐
17 Agustus 1950	Lembaga Kebudayaan Rakyat terbentuk dengan Mukadimah pertamanya
23 Oktober 1950	Surat Kepercayaan Gelanggang diterbitkan
6-11 Oktober 1951	Kongres Kebudayaan di Bandung
18-24 April 1955	Konferensi Asia-Afrika di Bandung
Juli 1955	Konferensi Nasional Lekra, Mukadimah diperbarui
Januari 1956	STICUSA perwakilan Indonesia secara resmi dibubarkan
22-28 Januari 1959	Lekra menggelar kongres nasional di Solo dan manifesto tahun 1957 disetujui
20-21 Mei 1959	LKN berdiri pada 19 Mei 1959 di kongres pertamanya
5 Juli	Dekrit Presiden, Indonesia ‐kembali ke UUD 1945‐. Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan
17 Agustus 1959	Dimulainya Demokrasi Terpimpin
19- 20 Mei 1962	Konferensi Besar LKN di Semarang
4 April 1963	Konfrontasi melawan Malaysia diumumkan

11-14 September 1963	Konges II LKN di Jakarta
November 1963	Games of the New Emerging Forces (GANEOF)
Desember 1963	Badan Musyawarah Kebudayaan Islam (BMKI) didirikan
April 1964	Festival Film Asia Afrika (FFAA) III di Jakarta
8 Mei 1964	Manifesto Kebudayaan dilarang
9 Mei 1964	Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika (PAPFIAS) dibentuk
25 Agustus 1964	Musyawarah Seniman LKN menghasilkan rumusan-rumusan Tavip di bidang kebudayaan
27 Agustus-2 September 1964	Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) di Jakarta
30 Septmber-1 Oktober 1965	Gerakan 30 September dan pengumuman pendirian "Dewan Revolusi"
Oktober 1965-Februari 1966	Pembantaian massa anggota PKI dan orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI dan organisasi kiri
Oktober 1965-1969	Pemburuan dan penangkapan orang komunis dan beraliran kiri dihukum tanpa proses hukum sampai akhir tahun 1970-an
11 Maret 1966	Jenderal Soeharto secara resmi mengambil kekuasaan dengan surat sebelas Maret
12 aret 1966	PKI dan Lekra resmi dilarang (TAP MPRS. 25/1966)
12 Juni 1970	Soekarno meninggal